

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang berjudul “Komunikasi Krisis Pemerintahan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasca Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014). Adapun temuan penelitian yang berhasil peneliti kumpulkan diperoleh dari pelaksanaan observasi, wawancara, penelusuran media *online*, dan penelusuran berita harian media lokal Provinsi Riau. Temuan penelitian tersebut akan penulis paparkan secara jelas dan lengkap.

A. Gambaran Krisis Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014

1. Kronologi Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014

Annas Maamun merupakan Gubernur Riau terpilih periode masa jabatan 2014-2019. Annas Maamun berpasangan dengan Arsyadjuliandi Rachman terpilih melalui proses demokrasi, yakni melalui Pemilihan Gubernur dan dinyatakan memperoleh suara terbanyak dari masyarakat Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Doni Aprialdi selaku Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Periode Jabatan Annas Maamun (14 Oktober 2016), dijelaskan bahwa Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman juga dinyatakan menang melalui proses sidang Mahkamah Konstitusi.

“Pak Annas terpilih menjadi Gubernur Riau berpasangan dengan Bapak Arsyadjuliandi Rachman sebagai wakil Gubernur Riau. Pasangan Annas–Andi terpilih melalui proses Demokrasi pemilihan Gubernur Riau Periode 2014–2019 secara Demokrasi suara terbanyak. Terpilihnya pasangan ini juga melalui proses sidang di MK karena adanya gugatan dari pasangan calon lain dan dimenangkan oleh pasangan Annas–Andi melalui keputusan MK Nomor :189/PHPU.D.XI/2013. Dan pasangan Annas–Andi dilantik tanggal 19 Februari 2014 oleh Presiden melalui Menteri

*Dalam Negeri Gamawan Fauzi di gelanggang olahraga Pekanbaru.*⁹⁶

Adapun Surat Keterangan Pengangkatan Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dapat dilihat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014. Dalam Surat Keputusan Presiden RI tersebut dapat diketahui bahwa Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman telah ditetapkan dan disahkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Annas Maamun menjadi Gubernur Riau ke-17 dimana sebelumnya juga terdapat beberapa tokoh yang telah menjabat sebagai Gubernur Riau. Adapun daftar nama para Gubernur Riau dari tahun 1958 hingga sekarang ialah sebagai berikut :

- 1) Mr. S. M. Amin (1958-1960)
- 2) H. Kaharuddin Nasution (1960-1966)
- 3) H. Arifin Achmad (1966-1978)
- 4) H.R. Soebrantas S. (1978-1980)
- 5) H. Prapto Prayitno (Plt. 1980)
- 6) H. Imam Munandar (1980-1988)
- 7) H. Baharuddin Yusuf (Plt. 1988)
- 8) Drs. Atar Sibero (Plt. 1988)
- 9) H. Soeripto (1988-1993)
- 10) H. Soeripto (1993-1998)
- 11) H. Saleh Djasit, SH. (1998-2003)
- 12) Dr. H. M. Rusli Zainal, S.E., MP. (2003-2008)
- 13) H. Wan Abu Bakar, M.Si. (Plt. 2008)
- 14) Dr. H. M. Rusli Zainal, S.E., MP. (2008-2013)
- 15) H.R. Mambang Mit (Plt. 2013)
- 16) Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA. (Plt. 2013-2014)
- 17) H. Annas Maamun (Februari 2014-September 2014)

⁹⁶ Doni Aprialdi, wawancara dengan penulis, 14 Oktober 2016.

18) Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA. (Plt. 2014-sekarang)⁹⁷

Annas Maamun dalam daftar tersebut tercatat menjabat sebagai Gubernur Riau terhitung mulai dari bulan Februari tahun 2014 hingga bulan September tahun 2014. Annas Maamun kemudian digantikan oleh Wakilnya, yakni Ir. Arsyadjuliandi Rachman, MBA. Singkatnya periode masa jabatan Annas Maamun tersebut dikarenakan Annas Maamun terjerat dalam kasus suap alih fungsi hutan Kuantan Singingi senilai Rp. 2 Miliar. Annas Maamun ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014.

“Terjadi guncangan setelah Pak Annas dituduhkan melakukan dugaan pelecehan kepada anak seorang pendidik Riau (Putri Soemardi Taher). Kasus ini seperti bola liar membuat ketenangan Pak Annas selaku Gubernur Riau mulai gelisah dan terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan yang gencar tiada hentinya. Baik media Nasional maupun lokal. Tidak ada kasus lain yang menonjol selain kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Tiba-tiba sewaktu Pak Annas di Jakarta selama 6 hari beliau OTT di rumah pribadinya di Cibubur. Semua kaget karena tiba-tiba dan langsung ditahan, kami justru mendapatkan info awal ini melalui Running Text Metrotv ba'da Sholat Magrib saat itu.”⁹⁸

Annas Maamun tertangkap bersama 8 orang lainnya, di antaranya ialah Gulat Manurung, Hj. Latifah Hanum (istri Annas Maamun), Erianda (anak dari Annas Maamun yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir), sopir, dan beberapa ajudan Annas Maamun. Adapun lokasi penangkapan Annas Maamun ialah berada di Kompleks Perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur. Lokasi tersebut merupakan kediaman Annas Maamun yang ada di Jakarta.

⁹⁷ Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Riau, *Buku Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015* (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau, 2015), hal. 2.

⁹⁸ Doni Aprialdi, wawancara bersama penulis, 14 Oktober 2016.

“saat ditangkap beliau berada di Cibubur rumah pribadi beliau.”⁹⁹

Lokasi tersebut juga ditinggali oleh salah seorang anak Annas Maamun yang ada di Jakarta. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut terjadi pada pukul 17.30 WIB dan memperoleh barang bukti uang sejumlah 156 ribu dollar Singapura dan Rp. 500 juta serta ditemukan juga uang tunai sejumlah 300 ribu dollar Singapura. Namun, diketahui bahwa uang tunai sejumlah 300 ribu dollar Singapura tersebut adalah uang pribadi milik Annas Maamun.

Riau Pos
 JUMAT 26 SEPTEMBER 2014 | ZULHILAH 1435 | 44 HALAMAN
 Bagan Negeri Bjakta Bagan
 ECRAN Rp4.500 LANGGANAN Rp1.200.000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

KPK Tangkap Annas Maamun
 JAKARTA (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sembilan orang di sebuah pertemuan mewah, Citra Grand, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/9), sekitar pukul 17.30 WIB. Salah satu yang ditangkap adalah Gubernur Riau Annas Maamun. Sampai berita ini diturunkan, belum jelas kasus apa yang melibatkan Guhri sehingga ditangkap KPK.
 — Baca APK halaman 11

Ada Blacklist Calon Menteri
 Laporan IPNN, Jakarta
 TARIK bagaimana seleksi calon menteri yang membantu Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi dan Kallianthes Mitrat, mantan wali kota Solo, Jokowi hanya memastikan rantisnya ada daftar hitam atau blacklist untuk setiap calon menteri. Diwarnai di surat-surat, Jokowi arti bicara kendati menggelar pertemuan selama 3 jam dengan PK dan Tim Transisi. Dia menataurkan, jelas ada Blacklist yang akan diterapkan pada...
 — Baca Ada halaman 11

DPR Tetapkan Pilkada DPR
 JAKARTA (RP) - Rapat paripurna DPR Pilkada akhirnya menetapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Sebanyak 226 anggota memilih pilkada melalui DPRD dan 126 anggota memilih pilkada langsung. Paripurna juga berlangsung riuh. Keriuhan dipicu ketokan pada pimpinan rapat Priyo Budi Santoso yang memarahis dua opisi voting RUU Pilkada. Setelah keriuhan reda dan sidang dilanjutkan, pihak Fraksi Demokrat minta bicara yang disampaikan Henry K Hartono. Henry pun langsung menyampaikan sikap Fraksi Demokrat yang memilih opsi netral. Bentuk netralitasnya, anggota...
 — Baca Paripurna halaman 2

Hasil Tes CPNS Diumumkan Langsung
 PEKANBARU (RP) - Hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 akan diumumkan secara langsung beserta peserta menyelesaikan proses seleksi. 7 orang itu dibacakan yang mengikat proses simulasi CAT, hanya 23 orang yang berhasil memenuhi kriteria untuk lulus CPNS. Untuk proses simulasi itu, panitia menepatkan 50 menit...
 — Baca Ada halaman 2

Bertahan Dulu, lalu Menyerang
 KOREA UTARA vs INDONESIA
 INCHEON (RP) - Setelah

Gambar 3.1
Berita Penangkapan Annas Maamun
 Sumber : Arsip e-paper Bulan September Harian Riau Pos

Adapun keberangkatan Annas Maamun ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 dikarenakan ingin menghadiri temu ramah masyarakat Rokan Hilir dan Tionghoa Rokan Hilir. Acara tersebut

⁹⁹ Doni Aprialdi, wawancara bersama penulis, 14 Oktober 2016.

dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 di Hotel Acatia, Matraman, Jakarta. Acara tersebut berlangsung sehari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut terjadi. Selama berada di Jakarta, Annas Maamun didampingi oleh Doni Aprialdi (Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau), Fuaddilazi (Kepala Bagian Protokol), dan Burhanuddin (Kepala Bagian Penghubung Provinsi Riau). Namun, pada hari penangkapan Annas Maamun yakni tanggal 25 September 2014, para pejabat Pemerintah Provinsi Riau tersebut telah kembali pulang ke Pekanbaru.¹⁰⁰

Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, Annas Maamun diduga telah menerima suap yang diberikan oleh pengusaha kelapa sawit sekaligus Dosen Fakultas Pertanian di salah satu universitas di Riau. Gulat Manurung juga merupakan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau. Diketahui uang suap yang diberikan oleh Gulat Manurung kepada Annas Maamun ialah terkait perolehan izin alih fungsi Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi Areal Peruntukan Lain (APL) seluas 140 hektare di Kuantan Singingi, Riau. Di samping itu, KPK juga mencurigai suap tersebut diberikan oleh Gulat Manurung sebagai uang muka bagi Annas Maamun agar memberikan sejumlah proyek di Provinsi Riau kepadanya. Berdasarkan kasus tersebut, KPK melakukan penyidikan lebih lanjut serta pemeriksaan kepada beberapa saksi yang berada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) berlangsung. Hingga akhirnya pada tanggal 26 September 2014, Annas Maamun ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Gulat Manurung setelah melalui proses pemeriksaan selama 24 jam.¹⁰¹

Annas Maamun sebagai penerima kemudian dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Tipikor. Sedangkan, Gulat Manurung sebagai pemberi dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tipikor. Annas Maamun kemudian

¹⁰⁰ “KPK Tangkap Annas Maamun,” *Riau Pos*, 26 September, 2014, hal. 11.

¹⁰¹ “KPK Tetapkan Annas dan Gulat Tersangka,” *Riau Pos*, 27 September, 2014, hal. 11.

ditahan di Rutan Guntur, sedangkan Gulat Manurung ditahan di Rutan KPK. Kasus tersebut terus berlanjut hingga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memiliki keterkaitan dengan tindakan korupsi yang dilakukan. Pada tanggal 30 September 2014, Nuryani Dewi Ningrum (Admin legal PT. Sinar Bahana Mulya), Tati dan Tety YS. (Kasir PT. Ayu Masagung Money Changer) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gulat Manurung.¹⁰² Pada tanggal yang sama, Annas Maamun dan Gulat Manurung juga diperiksa sebagai saksi silang. Annas Maamun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gulat Manurung, sedangkan Gulat Manurung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Annas Maamun. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara jelas konstruksi kasus serta apakah ada keterlibatan dari pihak lainnya.¹⁰³

Pada tanggal 3 Oktober 2014, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Edison Marudut Marsaduli. Edison Marudut Marsaduli merupakan seorang pengusaha dan juga menjabat sebagai bendahara DPD Partai Demokrat Riau. Edison Marudut Marsaduli juga merupakan Direktur Utama PT. Citra Hokiana Triutama yang pernah memenangkan proyek peningkatan jalan di Kuantan Singingi, Riau.¹⁰⁴ Pada tanggal 4 Oktober 2014, KPK kemudian melakukan penggeledahan rumah beserta kantor Gulat Manurung. Rumah Gulat Manurung yang digeledah beralamat di Jalan Rawa Sari No. 8, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan pada pukul 10.00 WIB oleh enam petugas KPK beserta beberapa personil Brimob Polda Riau. Penggeledahan kemudian selesai pada pukul 12.00 WIB dan terdapat tiga kardus berisi dokumen yang diamankan oleh petugas KPK. Kemudian, penggeledahan dilanjutkan ke kantor Gulat Manurung yang berada di Jalan Arifin Achmad. Adapun nama dari kantor tersebut ialah PT. Anugerah Kelola Artha. Penggeledahan dilakukan selama lebih dari empat jam. Dari penggeledahan yang dilakukan di kantor tersebut,

¹⁰² “KPK Periksa Saksi untuk Gulat,” *Riau Pos*, 1 Oktober, 2014, hal. 1.

¹⁰³ “Giliran Gulat Manurung Diperiksa KPK,” *Riau Pos*, 2 Oktober, 2014, hal. 2.

¹⁰⁴ “KPK Mulai Garap Saksi Kunci,” *Riau Pos*, 4 Oktober, 2014, hal. 3.

diamankan empat koper serta satu tas jinjing yang kemudian akan dibawa oleh Tim Penyidik KPK.¹⁰⁵

KPK Geledah Rumah dan Kantor GM

PEKANBARU (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan rumah dan kantor tersangka Gulat Manurung (GM) di Pekanbaru, Sabtu (4/10). Pengeledahan ini untuk mendalami dugaan penerimaan suap alih fungsi lahan dengan tersangka Gubernur Riau, Annas Maamun.

Lokasi pertama yang di-geledah kemarin adalah kediaman Gulat di Jalan Rawa Sari No 8, Kecamatan Bukitraya Pekanbaru. Sekitar enam orang petugas KPK yang sebagian besarnya memakai masker penutup hidung dan mulut mulai mengeledah sejak pukul 10.00 WIB dengan dikawal personil Brimob Polda Riau.

Rumah Gulat ini, adalah rumah mewah bertingkat dua dengan warna cat mayoritas kuning dikelilingi pagar, terparkir di rumah ini satu unit mobil Nissan Grand Livina plat merah. Di sini, pengeledahan berlangsung selama dua jam.



GELEDAH KANTOR: Tim penyidik KPK mengeledah rumah dan kantor Gulat Manurung di Pekanbaru, Sabtu (4/10/2014).

Pada pukul 12.00 WIB, petugas yang diturunkan keluar dengan membawa tiga kardus berisi dokumen.

Usai mengeledah rumah Gulat, masih dengan kawalan Brimob Polda Riau, tim KPK bergerak ke PT Anugerah Kelola Artha di Jalan Arifin Achmad, kantor milik Gulat Manurung.

Di sana, tak tampak aktifitas kerja, namun terlihat plang nama kantor terpasang di lantai dasar bangunan ruko tiga lantai ini.

Begitu tiba, penyidik KPK langsung masuk ke dalam dan menutup pintu kantor, sementara petugas Brimob tampak berjaga. Saat pengeledahan

di kantor ini, tampak terparkir di depan kantor satu unit mobil Mitsubishi Strada Triton Double Cabin. Selama pengeledahan, beberapa kali penyidik keluar dan masuk dari bangunan kantor dengan membawa berkas-berkas. Seorang penyidik yang sempat dikonfirmasi terkait pengeledahan enggan memberikan keterangan. "Nanti ya," sebutnya.

Di kantor Gulat, pengeledahan berlangsung lebih dari empat jam. Total, dari dua lokasi pengeledahan setidaknya ada empat koper, tiga kardus dan satu tas jinjing berisi dokumen dibawa penyidik KPK. Rombongan KPK ini kemudian meninggalkan lokasi menggunakan tiga unit mobil Toyota Innova.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tim penyidik Sabtu (4/10) kemarin turun ke Pekanbaru untuk melakukan pengeledahan di rumah pribadi dan kantor Gulat Manurung

tersangka kasus penyuaan alih fungsi hutan seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singising sebesar Rp2 miliar.

Pengeledahan ini dilakukan untuk mengembangkan dan mendalami kasus yang melibatkan Gubernur Riau Annas Maamun selaku penerima. Orang nomor satu di Riau itu pun kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Guntur.

"Ya, benar ada pengeledahan (rumah dan Kantor Gulat di Pekanbaru, red)," ujar Johan Budi juru bicara KPK dikonfirmasi *Riau Pos* soal pengeledahan tersebut, Sabtu (4/10) di Jakarta.

Namun Johan belum mendapatkan informasi hasil pengeledahan yang dilakukan penyidik KPK. Begitu juga adanya pengeledahan di lokasi lain, termasuk rencana pengeledahan berikutnya. "Saya belum dapat informasi soal hasilnya," ungkap Johan. (ali/yud)

Gambar 3.2 Berita KPK Geledah Rumah dan Kantor Gulat Manurung

Sumber : Arsip e-paper Bulan Oktober Harian Riau Pos

Pada tanggal 5 Oktober 2014, Tim Penyidik KPK melakukan pengeledahan di kediaman Annas Maamun yang berada di Jalan Belimbing, Pekanbaru. Pengeledahan dilakukan mulai pukul 10.20 WIB oleh belasan Tim Penyidik KPK dan didampingi oleh Noverius (Kasatpol PP Riau) serta Kasubbag Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Pengeledahan dilakukan hingga pukul 13.00 WIB dengan membawa satu koper berisi dokumen dan berkas-berkas yang segera diamankan oleh Tim Penyidik KPK. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2014 kembali dilakukan pengeledahan di ruang kerja Gubernur Riau. Pengeledahan dilakukan pada pukul 09.30 WIB dan selesai pada pukul 11.45 WIB. Dari pengeledahan yang dilakukan, Tim Penyidik KPK menyita slip gaji dari Gubernur Riau.¹⁰⁶

¹⁰⁵ "KPK Geledah Rumah dan Kantor GM," *Riau Pos*, 5 Oktober, 2014, hal. 2.

¹⁰⁶ "KPK Geledah Kediaman Annas Maamun," *Riau Pos*, 6 Oktober, 2014, hal. 3.

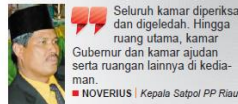
KPK Geledah Kediaman Annas Maamun

Laporan EKA GUSMADI
PUTRA, Pekanbaru
ekagusmadi@riaupos.co

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali melakukan pengeledahan di Pekanbaru. Setelah Sabtu (4/10) mengeledah kediaman dan kantor Gulat ME Manurang, Ahad (5/10) usai Salat Id, giliran kediaman Gubernur Riau, H Annas Maamun yang digeledah.

Tim KPK sejak Jumat (3/10) langsung bergerak cepat. Dua hari berturut-turut bukan kasus yang sedang ditangani langsung dikumpulkan di berbagai tempat di Pekanbaru. Selain mengeledah rumah dinas Gubernur, KPK juga melakukan pengeledahan di kediaman pribadi Annas Maamun di Jalan Belimbing, Pekanbaru. Jalan Belimbing juga kediaman siang kemarin, kata Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Yoserial Zen ketika dikonfirmasi Riau Pos, Ahad (5/10).

Berdasarkan pantauan Riau Pos, rombongan tim KPK yang menggunakan tiga



Seluruh kamar diperiksa dan digeledah. Hingga ruang utama, kamar Gubernur dan kamar ajudan serta ruangan lainnya di kediaman.
■ NOVERIUS | Kepala Satpol PP Riau

mendampingi.

Setelah masuk, tim KPK langsung mengeledah seluruh ruangan berikut menghimpun segala keperluan terkait data yang diperlukan. Sekitar dua jam setengah mereka melakukan pengeledahan. "Seluruh kamar diperiksa dan digeledah. Hingga ruang utama, kamar Gubernur dan kamar ajudan serta ruangan lainnya di kediaman," kata Kepala Satpol PP Riau, Noverius.

Tim KPK lanjut Noverius diketahui mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang menimpa orang nomor satu di Riau tersebut. Kurang tiga jam melakukan pengeledahan, sekitar pukul 13.00 WIB tim

KPK langsung meninggalkan rumah dinas dengan memb-

Sementara itu Kepala Biro Umum Setdaprov Riau Doni Apriladi kemarin mengemukakan memang ada tamu di kediaman Gubernur yang ingin melakukan pengeledahan. Hanya saja karena Hari Raya Idul Adha dan masyarakat melakukan penotongan hewan kurban, ia tidak mendampingi. "Tapi ada dari Bag-an Humas Tangga Biro Umum yang mendampingi selama pengeledahan. Belum dapat laporan apa yang dicari," sebutnya. Soalnya, tim yang turun tersebut tidak bisa dimintai komentar satupun. Baik sejak menerima Surat Keputusan

pada Sabtu maupun kemarin. **Wagub Biesak Annas Maamun**

Wagubri H Arsyadjulandi Rachman usai salat Salat Id,



SEPI: Kediaman pribadi Gubernur Riau Annas Maamun di Jalan Belimbing, Pekanbaru, sepi dan semua pintu tertutup rapat, sejak Gubri ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Rumah ini, Ahad (5/10/2014) di geledah KPK selama hampir tiga jam.

KPK, belum ada perubahan kepemimpinan di Provinsi Riau. Sebab Wagubri H Arsyadjulandi Rachman hingga Ahad (5/10) mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.

SK Plt Gubernur yang sejarahnya diserahkan Mendagri Gamawan Fauzi sesuai den-

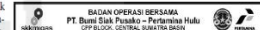
rahan yang menyandang status tersangka dan sudah ditahan tidak boleh menjalankan tugas dan kewenangan. "Kalau saja ke Kemendagri, saya belum ada terima," sebutnya.

Dengan belum diterimanya SK Plt Gubernur oleh Andi Rachman, maka hingga kini dirinya belum memiliki banyak kewenangan dalam menjalan-

kan tugas. Dengan cara tetap bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan dan membuat bagi Provinsi Riau. "Tunggu saja, yang penting kita tetap bekerja sesuai dengan aturan dalam menjalankan kegiatan yang sudah dirincikan Pak Gubernur," ajaknya (ade).

istat musuh harus dilekai Gubernur Annas Maamun.

Wagubri yang usai salat id kemarin yang bertolak ke Jakarta untuk membujuk Annas Maamun juga mengajak seluruh pihak menunggu SK Plt tersebut. Dengan cara tetap



Gambar 3.3
Berita KPK Geledah Kediaman Annas Maamun
Sumber : Arsip e-paper Bulan Oktober Harian Riau Pos

Pada tanggal 13 Oktober 2014, Annas Maamun kembali diperiksa oleh KPK terkait dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Annas Maamun. Diketahui jumlah harta kekayaan Annas Maamun ialah sebesar Rp. 12,4 Miliar. Terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Adapun harta bergerak yang dimiliki oleh Annas Maamun berupa dua kendaraan roda empat yaitu mobil Suzuki Baleno keluaran tahun 2001 dan 2003. Harta bergerak tersebut berjumlah Rp. 65 juta. Sedangkan, kepemilikan harta tidak bergerak oleh Annas Maamun berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp. 6,7 Miliar. Di samping itu, juga terdapat harta kekayaan berbentuk logam mulia dan batu mulia senilai Rp. 144 juta juga perkebunan kelapa sawit yang bernilai Rp. 240 juta. Annas Maamun juga menyimpan aset-asetnya dalam bentuk giro dan setara kas dengan jumlah Rp. 5,3 Miliar.¹⁰⁷

Pada tanggal 14 Oktober 2014, masa tahanan Annas Maamun kemudian dinyatakan oleh KPK diperpanjang hingga 40 hari ke depan terhitung sejak awal penahanan yang dilakukan pada tanggal 26

¹⁰⁷ "Annas Maamun Dicecar Soal Harta Kekayaan," *Riau Pos*, 14 Oktober, 2014, hal. 3.

September 2014 lalu.¹⁰⁸ Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2014 Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi yang berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. Dua orang saksi tersebut ialah Bambang Supriyanto (Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung) dan Masyhud (Direktur Perencanaan Kawasan Hutan). Pada kesempatan yang sama, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Cecep Iskandar (PNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau). Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang dibutuhkan bagi pengembangan penyidikan. Pada pemeriksaan yang dilakukan kurang lebih selama delapan jam tersebut juga diperoleh pernyataan yang dikemukakan oleh Masyhud (Direktur Perencanaan Kawasan Hutan). Masyhud menyebutkan bahwa pihak dari Kementerian Kehutanan mengaku tidak dapat mengakomodir permintaan perubahan kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Riau nonaktif tersebut.¹⁰⁹ Pada tanggal 17 Oktober 2014, Annas Maamun kembali diperiksa oleh KPK bersamaan dengan pemeriksaan yang juga dilakukan pada istri Annas Maamun. Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada hari Jum'at tersebut, Annas Maamun mengakui bahwa permohonan perubahan kawasan hutan yang disampaikan oleh Annas Maamun disetujui oleh Menteri Kehutanan yang menjabat pada saat itu, yakni Zulkifli Hasan.¹¹⁰

Pengeledahan kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap alih fungsi hutan senilai Rp. 2 Miliar tersebut. Pengeledahan kali ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 di kantor PT. Duta Palma dengan alamat Jalan OK M. Jamil, Pekanbaru. Pengeledahan dilakukan secara tertutup mulai pukul 11.00 WIB dan selesai pada pukul 15.00 WIB.¹¹¹ Selanjutnya, tindakan berikutnya yang dilakukan oleh KPK terkait kasus tersebut ialah

¹⁰⁸ “KPK Perpanjang Masa Penahanan Annas Maamun,” *Riau Pos*, 15 Oktober, 2014, hal. 3.

¹⁰⁹ “KPK Periksa Pejabat Kemenhut,” *Riau Pos*, 17 Oktober, 2014, hal. 3.

¹¹⁰ “Annas Akui Direstui Zulkifli Hasan,” *Riau Pos*, 18 Oktober, 2014, hal. 2.

¹¹¹ “KPK Geledah PT. Duta Palma,” *Riau Pos*, 21 Oktober, 2014, hal. 2.

melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Riau. Pemeriksaan terhadap beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Riau tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014. Adapun beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Riau yang diperiksa ialah Fuaddilazi (Kepala Bagian Protokol); Firman (Kasubbag Protokol); Fiko, Said Putra dan Taufik (Staf Protokol). Di samping itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap Chairul Riski (Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Riau). Beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Riau tersebut diperiksa di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru tepatnya berada di ruang Catur Prasetya. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk Annas Maamun tersebut dilakukan untuk pemenuhan keterangan mengenai penerimaan uang sejumlah Rp. 500 juta oleh Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun serta mengenai arsip alih fungsi hutan tersebut.¹¹²



DIPANGGIL KPK: Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemrov Riau Chairul Riski saat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks SPN Pekanbaru, Rabu (22/10/2014). Pemeriksaan ini terkait dugaan suap alih fungsi lahan dengan tersangka Gubernur Riau non-aktif Annas Maamun dan pengusaha Gulat ME Manurung.

Giliran Pejabat Pemprov Riau Diperiksa KPK

PEKANBARU (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait dugaan suap alih fungsi lahan dengan tersangka Gubernur Riau (Gubri) non-aktif Annas Maamun dan pengusaha Gulat Medali Emas Manurung. Terakhir beberapa

suap antara Gulat ME Manurung dan Annas Maamun. "Ditanyal tentang penerimaan uang Rp500 juta. Kita protokol disebut yang menyerahkan ke beliau," ujar Fuad. Sejak dimulai sekitar pukul 08.30 WIB, pemeriksaan hari berakhir sekitar pukul

Terkait pemeriksaan sejumlah staf dan pejabat di Pemprov Riau, Plt Gubernur Riau H Arsyad Julandi Rachman enggan mengomentari. Karena apa yang terjadi itu di luar pemerintah. "Biar saja berjalan, saya tak usah komentarkah," ujarnya saat dikonfirmasi kepada sapa

Plt Gubri juga menyatakan apa yang terjadi tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Riau sedapat mungkin melaksanakan tugas semaksimal mungkin dalam menjalankan roda pemerintahan demi pelayanan masyarakat

Budi, saat dikonfirmasi mengatakan satgas yang diturunkan ke Riau melakukan pendalaman soal tata ruang dan wilayah Riau. "Ada penyidik ke Riau untuk pemeriksaan penataan tata ruang dengan tersangka AM," kata Johan, Rabu (22/10) malam. Johan menyebutkan tim penyidik KPK sudah berada

Gambar 3.4

Berita Pejabat Pemprov Riau Diperiksa KPK

Sumber : Arsip e-paper Bulan Oktober Harian Riau Pos

¹¹² "Giliran Pejabat Pemprov Riau Diperiksa KPK," *Riau Pos*, 23 Oktober, 2014, hal. 3.

Keesokan harinya, pada tanggal 23 Oktober 2014 dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim Penyidik KPK terhadap saksi untuk Annas Maamun. Saksi yang diperiksa pada kesempatan tersebut ialah Zulkifli Yusuf (Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau) serta tiga orang karyawan PT. Citra Hokiana Triutama. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, ruang Catur Prasetya. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau.¹¹³ Pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2014 juga dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik KPK terhadap bos PT. Duta Palma dengan inisial SD, Zulher (Kepala Dinas Perkebunan Riau), Zulkifli Yusuf (Mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau), dan seseorang dari kalangan Pemerintah Provinsi Riau. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, ruang Catur Prasetya. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut juga masih memiliki keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau.¹¹⁴



Berlari: Bos PT Duta Palma berinisial SD berlari kencang menuju mobilnya usai dipertika di ruang Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Jumat (24/10/14).

Bos PT Duta Palma Berlari Usai Diperiksa KPK

Agung MALLINIRMAN,
Pekanbaru

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau di ruang Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Jumat (24/10/14). Salah satunya adalah bos PT Duta Palma berinisial SD yang berlari kencang menuju mobilnya usai dipertika di ruang Catur Prasetya SPN Pekanbaru, Jumat (24/10/14). Saksi lainnya adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf dan tiga karyawan PT Citra Hokiana Triutama. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB.

Tim penyidik KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau di ruang Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Jumat (24/10/14). Salah satunya adalah bos PT Duta Palma berinisial SD yang berlari kencang menuju mobilnya usai dipertika di ruang Catur Prasetya SPN Pekanbaru, Jumat (24/10/14). Saksi lainnya adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf dan tiga karyawan PT Citra Hokiana Triutama. Pemeriksaan dilakukan pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB.

Gambar 3.5
Berita Pemeriksaan Bos PT. Duta Palma oleh KPK
Sumber : Arsip e-paper Bulan Oktober Harian Riau Pos

¹¹³ “Mantan Kadishut Riau Ditanya KPK tentang RTRWP,” *Riau Pos*, 24 Oktober, 2014, hal. 3.

¹¹⁴ “Bos PT. Duta Palma Berlari Usai Diperiksa KPK,” *Riau Pos*, 25 Oktober, 2014, hal. 3.

Pada tanggal 27 Oktober 2014, Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya terkait kasus suap yang dilakukan oleh Annas Maamun. Tim Penyidik KPK memeriksa Arsyadjuliandi Rachman (Plt. Gubernur Riau), Wan Amir Firdaus (Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau), dan Dani (sopir pribadi Annas Maamun).¹¹⁵ Lalu, pada tanggal 30 Oktober 2014 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berasal dari PT. Duta Palma, yakni Anto (Humas PT. Duta Palma). Pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan pada pukul 09.30 WIB di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru bersamaan dengan tiga staf PT. Duta Palma lainnya.¹¹⁶ Pada tanggal 4 November 2014, Annas Maamun kembali diperiksa oleh Tim Penyidik KPK sebagai saksi untuk Gulat Manurung terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan kepada Kementerian Kehutanan. Pada hari yang sama, Gulat Manurung juga diperiksa oleh Tim Penyidik KPK dengan status tersangka.¹¹⁷

Tim Penyidik KPK terus berupaya untuk mendalami kasus suap yang dilakukan oleh Annas Maamun dan Gulat Manurung hingga pemeriksaan terus dilakukan. Hingga pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus suap alih fungsi hutan tersebut tetap dilakukan. Pemeriksaan pada tanggal 6 November 2014 tersebut dilakukan terhadap beberapa saksi untuk Annas Maamun, yakni Cecep Iskandar (PNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Riyadi Mustofa (pihak swasta), Gulat Manurung (pengusaha), dan Irwan Effendi (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau). Namun, pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh Irwan Effendi selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.¹¹⁸ Pemeriksaan juga terus dilakukan pada tanggal 7 November 2014 dimana saksi yang diperiksa ialah H. Bustaman. H.

¹¹⁵ “Annas Maamun dan Plt. Gubri Diperiksa,” *Riau Pos*, 28 Oktober, 2014, hal. 3.

¹¹⁶ “KPK Periksa Humas PT. Duta Palma,” *Riau Pos*, 31 Oktober, 2014, hal. 3.

¹¹⁷ “KPK Periksa Annas Maamun sebagai Saksi Gulat,” *Riau Pos*, 5 November, 2014, hal. 3.

¹¹⁸ “Kadishut Tak Penuhi Panggilan KPK,” *Riau Pos*, 7 November, 2014, hal. 3.

Bustaman merupakan saksi untuk Annas Maamun yang berprofesi sebagai pengusaha. Pemeriksaan terhadap H. Bustaman dinilai penting dikarenakan Tim Penyidik KPK membutuhkan keterangan H. Bustaman sebagai pelengkap dari pendalaman penyidikan kasus.¹¹⁹

Pemeriksaan kembali dilakukan oleh Tim Penyidik KPK terhadap Zulkifli Hasan (Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia) pada tanggal 12 November 2014 di Gedung KPK, Jakarta. Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengakuan Annas Maamun yang menyatakan bahwa pengajuan revisi alih fungsi hutan disetujui oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Namun, setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih delapan jam, Zulkifli Hasan menyatakan tidak pernah menyetujui pengajuan revisi alih fungsi hutan yang dimaksud oleh Annas Maamun. Hal tersebut dikarenakan syarat-syarat pengajuan revisi alih fungsi hutan di Kuantan Singingi, Riau belum lengkap. Oleh karena itu, surat permohonan perubahan izin kawasan hutan yang diajukan oleh Annas Maamun belum sampai pada Menteri Kehutanan dikarenakan persyaratan yang tidak lengkap.¹²⁰

Tanggal 14 November 2014, Tim Penyidik KPK kembali memanggil Bambang Soepijanto (Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan) untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, Bambang Soepijanto tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga pemeriksaan terpaksa dihentikan.¹²¹ Pemeriksaan saksi kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 November 2014 dengan penjadwalan pemeriksaan terhadap M. Romahurmuzyi (Mantan Ketua Komisi IV DPR periode 2004-2009). Namun, saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa yakni saksi untuk Gulat Manurung tersebut tidak hadir sehingga Tim Penyidik KPK hanya melakukan pemeriksaan terhadap Gulat Manurung dan Annas Maamun saja.¹²²

¹¹⁹ “KPK Periksa Bustaman,” *Riau Pos*, 8 November, 2014, hal. 2.

¹²⁰ “Zulkifli Hasan Bantan Beri Rekomendasi,” *Riau Pos*, 13 November, 2014, hal. 3.

¹²¹ “Dirjen Planologi Tak Penuhi Panggilan KPK,” *Riau Pos*, 15 November, 2014, hal. 3.

¹²² “Kasus Alih Fungsi Lahan Merambat ke DPR,” *Riau Pos*, 19 November, 2014, hal. 3.

Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan saksi-saksi dan penggeledahan yang dilakukan, Tim Penyidik KPK kemudian menggelar rekonstruksi kasus suap alih fungsi hutan yang terjadi antara Annas Maamun (Gubernur Riau Nonaktif) dan Gulat Manurung. Rekonstruksi kasus tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 di tiga lokasi berbeda. Rekonstruksi pertama kali dilakukan di Kantor Dinas Perkebunan Riau yang berada di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru. Rekonstruksi tersebut dilakukan pada pukul 11.00 WIB dengan Gulat Manurung, Zulher (Kepala Dinas Perkebunan Riau), dan tiga orang petinggi PT. Duta Palma (Surya Darmadi, Suheri Tirta, dan satu petinggi lainnya) sebagai pelaku rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan di ruangan Kepala Dinas Perkebunan Riau dengan topik rekonstruksi mengenai usulan untuk mengeluarkan lahan milik PT. Duta Palma yang berada di kawasan hutan Kuantan Singingi sehingga menjadi areal peruntukan lain (APL). Rekonstruksi di lokasi tersebut selesai dilakukan pada pukul 12.30 WIB dan kemudian dilanjutkan di lantai dasar Hotel Arya Duta. Hotel ini terletak di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Rekonstruksi yang dilakukan pada lokasi kedua ini melibatkan Gulat Manurung dan tiga orang petinggi PT. Duta Palma dengan topik rekonstruksi mengenai usulan suap Rp. 3 Miliar yang akan diberikan kepada Annas Maamun (Gubernur Riau Nonaktif) untuk mengubah status kawasan milik PT. Duta Palma dari kawasan hutan menjadi Area Peruntukan Lain (APL). Pada pukul 14.00 WIB kemudian rekonstruksi di lokasi kedua selesai dilakukan, dan berlanjut pada lokasi ketiga yakni berada di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru. Seharusnya, lokasi ketiga yang dijadikan lokasi rekonstruksi ialah Rumah Dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro. Namun, Annas Maamun menolak hingga akhirnya dilanjutkan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru. Pada lokasi rekonstruksi ketiga tersebut dilakukan dengan topik rekonstruksi mengenai pertemuan antara Gulat Manurung

dengan Annas Maamun yang menyebabkan terjadinya suap alih fungsi hutan tersebut.¹²³

Setelah rekonstruksi kasus suap alih fungsi hutan selesai dilakukan, kasus dapat diteruskan pada tahap kedua, yakni dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Namun, sebelum kasus tersebut naik ke pengadilan, pemeriksaan terhadap saksi Edison Marudut Marsadauli kembali dilakukan oleh Tim Penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan.¹²⁴ Kemudian, tanggal 15 Desember 2014 masa penahanan Annas Maamun diperpanjang selama 30 hari berlaku sejak tanggal 25 Desember 2014 hingga tanggal 24 Januari 2015.¹²⁵ Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, sidang perkara dugaan suap alih fungsi hutan Kuantan Singingi, Riau digelar. Sidang perkara tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Pada sidang tersebut, status Gulat Manurung telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Pada sidang tersebut juga terungkap bahwa Annas Maamun meminta kepada Gulat Manurung untuk diberikan uang sejumlah Rp. 2,9 Miliar, namun Gulat Manurung hanya menyanggupi untuk memberikan uang sebesar 166.100 dollar atau setara dengan Rp. 2 Miliar. Berdasarkan kasus suap alih fungsi hutan tersebut, Annas Maamun kemudian didakwa hukuman pidana kurungan selama enam tahun.¹²⁶

Adapun kronologi kasus secara runtut dan singkat dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kronologi Kasus Suap Annas Maamun

No.	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Kamis, 25 September 2014	Annas Maamun tertangkap bersama 8 orang lainnya melalui Operasi Tangkap Tangan oleh KPK di Perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur.
2.	Jum'at, 26 September	Annas Maamun ditetapkan sebagai

¹²³ “KPK Rekonstruksi Dugaan Suap Alih Fungsi,” *Riau Pos*, 26 November, 2014, hal. 11.

¹²⁴ “Edison Marudut Mulai Digarap KPK,” *Riau Pos*, 11 Desember, 2014, hal. 3.

¹²⁵ “KPK Belum Lihat Keterlibatan Menhut,” *Riau Pos*, 17 Desember, 2014, hal. 3.

¹²⁶ “Gulat Disebut Bendahara Tak Resmi Annas,” *Riau Pos*, 23 Desember, 2014, hal. 3.

	2014	tersangka kasus suap alih fungsi hutan Kuantan Singingi bersama dengan Gulat Manurung setelah diperiksa selama 24 jam.
3.	Selasa, 30 September 2014	Pemeriksaan saksi-saksi yakni Nuryani Dewi Ningrum (Admin legal PT. Sinar Bahana Mulya), Tati dan Tety YS. (Kasir PT. Ayu Masagung Money Changer).
4.	Selasa, 30 September 2014	Pemeriksaan juga dilakukan pada Annas Maamun dan Gulat Manurung.
5.	Jum'at, 3 Oktober 2014	Pemeriksaan terhadap saksi Edison Marudut Marsaduli.
6.	Sabtu, 4 Oktober 2014	Penggeledahan rumah dan kantor Gulat Manurung oleh KPK.
7.	Minggu, 5 Oktober 2014	Penggeledahan rumah Annas Maamun oleh KPK.
8.	Senin, 6 Oktober 2014	Penggeledahan ruang kerja Gubernur Riau.
9.	Senin, 13 Oktober 2014	Pemeriksaan harta kekayaan Annas Maamun oleh KPK.
10.	Selasa, 14 Oktober 2014	KPK menyatakan memperpanjang masa tahanan Annas Maamun untuk 40 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 September 2014.
11.	Kamis, 16 Oktober 2014	Pemeriksaan saksi dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (Bambang Supriyanto dan Masyhud)
12.	Jum'at, 17 Oktober 2014	Pemeriksaan kembali Annas Maamun beserta istri oleh KPK.
13.	Senin, 20 Oktober 2014	Penggeledahan kantor PT. Duta Palma oleh KPK.
14.	Rabu, 22 Oktober 2014	Pemeriksaan terhadap beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Riau (Fuaddilazi, Firman, Fiko, Said Putra, Taufik, Chairul Riski).
15.	Kamis, 23 Oktober 2014	Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni Zulkifli Yusuf (Mantan Kadis Kehutanan Provinsi Riau) dan tiga orang karyawan PT. Citra Hokiana Triutama.
16.	Jum'at, 24 Oktober 2014	Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni bos PT. Duta Palma, Zulher (Kadis Perkebunan Riau), Zulkifli Yusuf (Mantan Kadis Kehutanan Provinsi

		Riau), dan seseorang dari kalangan Pemerintah Provinsi Riau.
17.	Senin, 27 Oktober 2014	Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni Arsyadjuliandi Rachman (Plt. Gubernur Riau), Wan Amir Firdaus (Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau), Dani (Sopir pribadi Annas Maamun).
18.	Kamis, 30 Oktober 2014	Pemeriksaan terhadap saksi yakni Anto (Humas PT. Duta Palma).
19.	Selasa, 4 November 2014	Pemeriksaan kembali terhadap Annas Maamun dan Gulat Manurung oleh KPK terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan.
20.	Kamis, 6 November 2014	Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni Cecep Iskandar (PNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Riyadi Mustofa (Pihak swasta), Irwan Effendi (Kadis Kehutanan Provinsi Riau), dan pemeriksaan terhadap Gulat Manurung.
21.	Jum'at, 7 November 2014	Pemeriksaan terhadap saksi yakni H. Bustaman (Pengusaha) oleh KPK.
22.	Rabu, 12 November 2014	KPK melakukan pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan (Mantan Menteri Kehutanan RI) sebagai saksi.
23.	Jum'at, 14 November 2014	KPK melakukan pemanggilan pemeriksaan kepada Bambang Soepijanto (Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan), namun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan.
24.	Selasa, 18 November 2014	KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi yakni M. Romahurmuziy (Mantan Ketua Komisi IV DPR periode 2004-2009), namun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan.
25.	Selasa, 18 November 2014	Tim Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Annas Maamun dan Gulat Manurung.
26.	Selasa, 25 November 2014	Rekonstruksi kasus suap alih fungsi hutan digelar oleh KPK di tiga lokasi berbeda.
27.	Senin, 15 Desember 2014	KPK memperpanjang masa tahanan Annas Maamun selama 30 hari berlaku sejak tanggal 25 Desember 2014 hingga 24 Januari 2015.
28.	Senin, 22 Desember 2014	Sidang perkara dugaan suap alih fungsi hutan Kuantan Singingi, Riau digelar di

		Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta dan Annas Maamun divonis selama 6 tahun kurungan penjara.
--	--	---

2. Dampak Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014

Kasus suap yang terjadi antara Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun dengan pengusaha kelapa sawit yakni Gulat Manurung memberikan beberapa dampak negatif khususnya bagi Pemerintah Provinsi Riau. Adapun beberapa dampak tersebut menimpa hal-hal sebagai berikut :

a. Laju Perkembangan Sistem Pemerintahan Provinsi Riau Era Kepemimpinan Annas Maamun Menurun

Kasus suap Annas Maamun juga berdampak pada sistem pemerintahan Provinsi Riau. Hal tersebut dikarenakan pada masa penangkapan, Annas Maamun masih berstatus sebagai Gubernur Riau periode 2014-2019. Pemerintah Provinsi Riau sedikit mengalami keterlambatan perealisasiian program-program pemerintah dikarenakan Gubernur Riau sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan sedang menjalani masa tahanan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Doni Aprialdi selaku Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Periode Jabatan Annas Maamun (14 Oktober 2016) diperoleh hasil bahwa roda pemerintahan sedikit mengalami keterlambatan.

“Pemerintahan Provinsi Riau mengalami kegoncangan itu benar dan tidak berlarut-larut karena pemerintahan Riau tetap ada dan berjalan dengan baik tapi memang diakui terasa melambat karena faktor ketakutan dari semua elemen jenjang pemerintahan ditambah dengan adanya proses assesment dan peraturan baru lainnya sehingga Plt Gubernur Riau tidak bisa dengan leluasa mengangkat dan melantik Pejabat setingkat Kadis/Kaban/Biro di tingkat Provinsi (Kepala SKPD) dikarenakan harus melalui Open Biding/Panitia seleksi pansel (Assesment) sehingga berakibat penempatan aparatur untuk mengisi SKPD sedikit terhalang yang berakibat kepada realisasi

APBD pada tahun 2014 tersebut sedikit anjlok yaitu hanya sebesar 60 %."¹²⁷

Adanya perlambatan roda pemerintahan juga dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Yuli Subairie Nasir menyatakan dalam wawancara yang dilakukan (19 Oktober 2016) bahwa laju pemerintahan sedikit menurun akibat kasus yang menimpa Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun, namun sistem pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. "*Aktivitas di Pemerintah Provinsi Riau berjalan seperti biasa, hanya saja melambat.*"¹²⁸

Hal tersebut juga dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau saat kasus suap tersebut terjadi. Abdul Rahman Aziz selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau juga menyatakan bahwa, "*sistem pemerintahannya pasti agak menurun.*"¹²⁹ Menurunnya laju pergerakan sistem Pemerintahan Provinsi Riau tersebut tidak terlepas dari adanya kasus suap yang menimpa Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun.

Keterlambatan sistem pemerintahan tersebut dikarenakan Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun sebagai pihak pengambil keputusan yang berwenang sedang mengalami kasus hukum. Di samping itu, pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Plt. Gubernur Riau juga belum dilakukan sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Wakil Gubernur sedikit terbatas.

"Pemerintahan Provinsi Riau pasca OTT-nya Pak Annas Maamun sebagai Gubernur Riau berjalan seperti biasa walaupun otomatis sedikit melambat itu hanya dikarenakan kewenangan yang dimiliki Wakil Gubernur tidak serta merta sama dengan kewenangan yang dimiliki

¹²⁷ Doni Aprialdi, wawancara bersama penulis, 14 Oktober 2016.

¹²⁸ Yuli Subairie Nasir, wawancara bersama penulis, 19 Oktober 2016.

¹²⁹ Abdul Rahman Aziz, wawancara bersama penulis, 19 Oktober 2016.

oleh seorang Gubernur. Menjelang dikeluarkan surat Plt. Gubernur oleh Presiden RI melalui Mendagri, Pemerintahan Provinsi Riau berjalan seperti biasa saja hanya menjalankan rutinitas pemerintahan seperti biasa setelah Plt. ditunjuk barulah Pemerintahan Provinsi Riau berjalan agak normal apalagi setelah definitif sampai hari ini berjalan sangat baik.”¹³⁰

Keterbatasan kewenangan tersebut pun kemudian berdampak pada 100 honorer yang belum menerima pernyataan mutlak dari Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun. Hal tersebut kemudian mengakibatkan 100 honorer Kategori Dua (K2) Provinsi Riau tidak menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pernyataan mutlak yang seharusnya dikeluarkan oleh Gubernur Riau Nonaktif tersebut tidak dapat dikeluarkan karena Annas Maamun sedang menjalani proses hukum. Oleh karena itu, permasalahan terkait 100 honorer tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh Plt. Gubernur Riau nantinya.¹³¹



Gambar 3.6
Berita 100 Honorer yang Tidak Menerima Pernyataan Mutlak Gubernur Riau
Sumber : Arsip e-paper Bulan Oktober Harian Riau Pos

Kemudian, setelah Wakil Gubernur Riau yakni Arsyadjuliandi Rachman diangkat sebagai Plt. Gubernur Riau oleh Presiden

¹³⁰ Doni Aprialdi, wawancara bersama penulis, 14 Oktober 2016.

¹³¹ “Plt. Gubri Pelajari Honorer K2,” *Riau Pos*, 20 Oktober, 2014, hal. 21.

Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri RI, sistem pemerintahan sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan dilimpahkan kepada Plt. Gubernur Riau sehingga memudahkan perealisasi program-program pemerintah.

“Setelah adanya SK Plt Gubri ditunjuk oleh Presiden melalui Mendagri (Wakil Gubernur sebagai Plt Gubri) barulah pemerintahan Provinsi Riau berjalan agak normal dan semakin normal setelah keluarnya kepres No.49 /P/2016 tentang pengangkatan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Definitif yang ditandai dilantiknya Bapak Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal bersamaan dengan pelantikan Gubernur Sumatera Utara, Kepri dan Kalsel.”¹³²

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Yuli Subairie Nasir selaku Pegawai Negara Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Yuli Subairie Nasir (19 Oktober 2016) dinyatakan bahwa pengambilan keputusan kemudian dilimpahkan kepada Wakil Gubernur Riau yang kemudian menjabat sebagai Plt. Gubernur Riau 2014-2019.

“Untuk pola pengambilan keputusan pasca tertangkapnya Annas Maamun otomatis Andi Rachman yang saat itu sebagai Wakil Gubernur Riau naik ke puncak kekuasaan sehingga keputusan berada di tangannya.”¹³³

Meskipun roda pemerintahan Provinsi Riau mengalami sedikit penurunan akibat kasus tersebut, namun hak-hak dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau tetap diterima sebagaimana seharusnya. Yuli Subairie Nasir selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau menyatakan bahwa hak-hak sebagai PNS tetap diterima. *“Hak-hak PNS seperti gaji dan tunjangan beban kerja*

¹³² Doni Aprialdi, wawancara bersama penulis, 14 Oktober 2016.

¹³³ Yuli Subairie Nasir, wawancara bersama penulis, 19 Oktober 2016.

tetap diterima."¹³⁴ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau lainnya yang menyatakan bahwa hak-hak sebagai PNS tetap diterima, meskipun terkadang mengalami sedikit keterlambatan. *"Kalau seperti tunjangan-tunjangan tidak ada kendala. Ada terlambat, tidak semua. Paling-paling satu-dua bulan."*¹³⁵

- b. APBD 2014 Menurun, RAPBD 2015 Ditolak, hingga Perealisasi Program Pemerintah yang Gagal

Saat kasus suap menimpa Annas Maamun selaku Gubernur Riau Nonaktif 2014-2019, kasus tersebut ternyata juga berdampak pada nilai resapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

*"Biasanya sebelum Gubernur sebelum Annas, Pak Rusli Zainal, biasanya akhir tahun selalu resapan APBD 80 sampai 90 persen. Semenjak Pak Annas ditangkap tidak pernah mencapai angka 80 sampai 90 persen. Pasti di bawah 80 persen. 60 atau 65 persen."*¹³⁶

Hal tersebut kemudian berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Riau, baik itu dari segi fisik, meliputi sarana, prasarana, pembangunan. Hingga non-fisik, meliputi keuangan daerah. Bahkan, tidak hanya mengalami penurunan resapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Melainkan juga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Riau di bawah persetujuan Annas Maamun ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan RAPBD yang diusulkan melalui tahap revisi dari Annas Maamun sehingga diragukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

¹³⁴ Yuli Subairie Nasir, wawancara bersama penulis, 19 Oktober 2016.

¹³⁵ Abdul Rahman Aziz, wawancara bersama penulis, 19 Oktober 2016.

¹³⁶ Abdul Rahman Aziz, wawancara bersama penulis, 19 Oktober 2016.

Republik Indonesia hingga akhirnya dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Riau.¹³⁷

APBD Riau Terancam Tak Diteken Mendagri

JAKARTA (RP) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan APBD Provinsi Riau 2015 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Riau bermasalah, dan terancam tidak ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riadmadji mengatakan, permasalahan tersebut berkaitan dengan penyerahan APBD Riau kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah bukan hasil pembahasan antara Pemprov Riau dengan DPRD, melainkan APBD hasil revisi Gubernur Riau non-aktif H. Annas Maamun.

Saat ini menurut Dodi, APBD Riau 2015 tersebut sedang proses revisi antara Plt Gubernur Riau Arsyadjulandi Rachman dengan Kemendagri. "APBD Riau sekarang ada masalah makanya dievaluasi. Masalahnya itu Gubernur yang sekarang ditahan KPK itu mengubah draft APBD yang dikirim ke Kemendagri. Jadi tidak sama dengan draft yang dibahas

lalu nantinya setelah dievaluasi ternyata ditemukan fakta, bahwa APBD Riau 2015 yang diserahkan ke Kemendagri berbeda datanya dengan draft yang dibahas oleh Gubernur dengan DPRD, itu menyalahi aturan. Sehingga kendala penggunaan anggaran sudah menjadi risikonya.

"Jelas itu menyalahi ketentuan. Itu risiko (anggaran tidak bisa digunakan-red). Artinya sejak awal sudah ada niat yang kurang sejalan dengan regulasi yang ada," tegasnya.

Dodi menambahkan kemungkinan perbedaan anggaran antara kedua draft tersebut cukup besar. Tapi ia tidak mengetahui persisnya karena tidak ikut membahas, ia sangat menyayangkan hal ini karena Kemendagri sudah memberikan aturan dan rambu-rambu dalam pembahasan APBD. "Kemungkinan perbedaan angkanya besar, persisnya saya tidak ikut mengevaluasi. Tapi pedoman menyusun APBD kan sudah ada standarnya, rambu-rambu dari Kemendagri sudah ada," katanya.

Demikian pula terkait apakah verifikasi APBD tersebut tetap dilanjutkan, Andi Rachman mengaku belum mendapat informasi dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Saya tidak tahu bagaimana ke depannya. Yang jelas kita tetap berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai APBD ini karena tahapannya memang sekarang sedang dievaluasi," lanjutnya. Sementara itu Sekdaprov Riau Zaini Ismail ketika coba dikonfirmasi tidak bisa dihubungi. Demikian pula Kepala Bappeda Riau, M. Yafiz yang juga belum bisa dimintai keterangan.

Dalam pada itu, anggota DPRD Riau mengaku tidak mengetahui informasi tentang indikasi penyimpangan APBD 2015. Kendati demikian anggota legislatif akan mempelajari dan menentukan sikap terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Anggota DPRD Riau, Mansur mengaku kecewa dengan adanya sinyal penyelewengan anggaran di APBD 2015. Jika itu terbukti anggota DPRD

Gambar 3.7

Berita RAPBD Riau yang Terancam Tidak Ditandatangani Kemendagri RI

Sumber : Arsip e-paper Bulan November Harian Riau Pos

Di samping itu, penolakan penandatanganan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga dikarenakan ada beberapa poin penting dalam RAPBD yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan DPRD Provinsi Riau sebelumnya. Ketidaksesuaian tersebut terjadi setelah dilakukan revisi oleh Annas Maamun selaku Gubernur Riau. Namun dikarenakan Annas Maamun telah menjadi tahanan KPK, maka pembahasan mengenai RAPBD Provinsi Riau seharusnya dilimpahkan kepada Plt. Gubernur Riau, yakni Arsyadjulandi Rachman. Oleh karena itu, sebelum RAPBD Provinsi Riau disetujui dan ditandatangani oleh Kemendagri RI terlebih dahulu akan dikembalikan kepada DPRD Provinsi Riau untuk dipelajari lebih lanjut.¹³⁸

¹³⁷ "APBD Riau Terancam Tak Diteken Mendagri," *Riau Pos*, 10 November, 2014, hal. 3.

¹³⁸ "Mendagri Kembalikan RAPBD Riau," *Riau Pos*, 11 November, 2014, hal. 4.

Mendagri Kembalikan RAPBD Riau

JAKARTA (RP) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak menandatangani draft Rancangan APBD Riau 2015 yang disampaikan Gubernur Riau non-aktif H Annas Maamun karena tidak sesuai dengan draft hasil pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riadmadji di Jakarta, Senin (10/11). Menurutnya, RAPBD yang disampaikan Gubernur Riau untuk diverifikasi memang berbeda dengan yang dibahas dengan DPRD.

Pada saat dibahas Dirjen Keuangan Daerah ketahuan ada beberapa mata anggaran yang dinaikkan besarnya. Karena itu Pak menteri kita laporkan dan belum mau menandatangani evaluasi itu," kata Dodi.

RAPBD Riau 2015 hasil pembahasan Pemprov Riau dengan DPRD sudah ketok palu sekitar Rp10,7 triliun. Namun fakta yang ditemukan Dirjen Keuangan Daerah, ditemukan sejumlah mata anggaran yang dinaikkan besarnya. Namun, Dodi belum membeberkan berapa jumlah *markup* anggaran tersebut.



Kemungkinan (dibahas ulang dengan DPRD *red*). Habis, kalau data berbeda hasil evaluasi kementerian, disetujui, konyol menteri. Silakan dibahas dulu.



■ DODI RIADMADJI

Kapussen Mendagri mengaku hanya mengikuti hingga pembahasan KUA-PPAS saja. "Setelah KUA-PPAS Bappeda tidak ikut lagi. Jadi tak tahu infonya," ujar mantan Staf Ahli Gubernur tersebut.

Sementara itu TAPD lainnya, Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, H Jonli menyampaikan Pemprov hingga Senin (10/11) malam belum mendapat informasi terkait pengembalian draf RAPBD 2015 tersebut.

Hanya saja memang Pemprov Riau sudah melaporkan ke Mendagri RI tentang permasalahan di APBD 2015 berupa adanya penggantian draf RAPBD.

"Makanya dilayangkan surat untuk meminta petunjuk Mendagri RI. Sekarang kita menunggu petunjuknya bagaimana," ujar Jonli.

TAPD sebutnya, siap

sanakan pembahasan sudah mengacu pada Permendagri. Harusnya Mendagri itu melakukan evaluasi dan verifikasi, ungkapnya kepada *Riau Pos*, malam tadi.

Dengan pertimbangan itu, ia mempertanyakan bahwa pengembalian yang disebutkan Mendagri, ia menilai jika dalam verifikasi ditemukan kesalahan, baru akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Politisi Partai Golkar itu juga menerangkan proses penganggaran tersebut. "APBD yang sudah disahkan oleh DPRD kemudian gubernur mengirim ke Mendagri. Tujuannya agar selaras dengan pembangunan nasional. Jika hasil verifikasi ada beberapa kesalahan dalam penggunaan anggaran, maka akan diperbaiki. Salah satu hasil verifikasi adalah dalam bentuk temuan. Umpama, pembuangan yang tidak kewenangan provinsi, ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah," ulasnya.

Pemerintah memperbaiki sesuai Permendagri, tujuh hari setelah itu harus dilakukan perbaikan. Kemudian pemerintah menyerahkan ke DPRD. Untuk dijadikan SK persetujuan dan disahkan pada "Desember

Gambar 3.8

Berita mengenai RAPBD Riau Tahun 2015 yang Dikembalikan oleh Mendagri

Sumber : *Arsip e-paper Bulan November Harian Riau Pos*

Dikarenakan APBD Tahun 2014 yang bermasalah hingga RAPBD Tahun 2015 yang belum memperoleh persetujuan dari Mendagri RI, maka hal tersebut pun berdampak lebih luas pada beberapa kebijakan dan program pemerintah. Program pemerintah yang seharusnya dapat direalisasikan kemudian mengalami kendala dan terhenti hingga terancam tidak dapat direalisasikan. Mengingat pemimpin tertinggi Provinsi Riau sedang mengalami masa penahanan oleh KPK, maka beberapa proyek yang harus direalisasikan tidak dapat diteruskan karena kendala pada perizinan dan persetujuan dari pimpinan. Adapun beberapa kebijakan dan program pemerintah yang tidak terealisasikan di antaranya ialah proyek *Water Front City* di pinggiran Sungai Siak. Proyek yang diusung oleh Annas Maamun tersebut mengalami kendala dan tidak diteruskan karena permasalahan anggaran yang dipindahkan ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. RAPBD tahun 2015 yang belum memperoleh persetujuan tersebut kemudian dinilai tidak

akan memberikan porsi bagi proyek *Water Front City* tersebut sehingga untuk sementara waktu dihentikan.¹³⁹

16 |

FEATURE

Riau Pos
AHAD 21 DESEMBER 2014

Menelisik Batalnya Penataan Kawasan Sungai Siak

Water Front City Harapan yang Sirna

Water Front City bukan hal yang baru bagi masyarakat Pekanbaru. Semangat penataan kawasan pinggir sungai itu sudah didengungkan sejak tahun 2010-an lalu. Kini, asa itu masih tertatih tak kunjung terealisasi.

Laporan, MARRHO KISAZ, Pekanbaru
marrho.kisaz@riaupos.co

SUNGAI Siak memiliki pesona eksotis. Daya tariknya ibarat magnet yang memancing mata untuk sekedar berhenti sejenak melihat pesona alam. Gemerik air sungai dibalut ombak-ombak kecil memempukakan pemandangan indah senja itu.

Pijar lampu jalan yang seakan memantul ke air memberikan nilai artistik tersendiri. Indah di atas sungai terlihat dua jembatan berdiri kokoh membentang di sungai yang informasinya menjadi sungai terdalam di Indonesia itu. Hanya saja, di beberapa sisi masih terlihat pemandangan yang miris, visualisasi



Pengembangan *water front city* berperand alam meningkatkan daya tarik dan keindahan Sungai Siak serta Kota Pekanbaru, urai Akademisi Universitas Islam Riau itu.

Ia menambahkan pengembangan konsep *water front city* juga berperan peningkatan kebersihan dan keasrian lingkungan, khususnya pinggir Sungai Siak. Hanya saja, ia berharap planning tersebut tidak hanya menjadi wacana. Pemerintah sejatinya dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam memiliki suatu destinasi wisata di ibukota provinsi Riau.

Tokog Kabupaten Kuantan Singingi itu menilai, wacana tersebut sudah pernah didengungkan sejak 10 tahun yang lalu, namun sampai saat ini tak kunjung terealisasi. Padahal program tersebut memiliki nilai substansi positif jika dapat diterapkan dan dikelola secara proporsional.

Sementara itu, Pemerintah Kota Pekanbaru Pemko juga be-

Gambar 3.9

Berita Proyek *Water Front City* yang Dihentikan

Sumber : Arsip e-paper Bulan Desember Harian Riau Pos

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 yang mengalami kendala dengan resapan dana yang sangat rendah juga berdampak pada kelanjutan pembangunan Gedung Bedah Central Pekanbaru. Pembangunan Gedung Bedah Central tersebut tidak bisa dilanjutkan karena APBD yang bermasalah hingga dilimpahkan ke RAPBD tahun 2015. Namun, kelanjutan pembangunan tersebut belum dibahas secara rinci oleh Pemerintah Provinsi Riau karena RAPBD tahun 2015 yang belum disetujui. Di samping itu, pihak pelaksana proyek juga tidak dapat meneruskan pembangunan karena permasalahan tersebut.¹⁴⁰

Selain itu, dampak lainnya yang terjadi akibat ditetapkannya Annas Maamun sebagai terdakwa kasus suap ialah beberapa proyek yang batal direalisasikan. Hal tersebut dikarenakan Plt. Gubernur Riau tidak memiliki kewenangan penuh seperti kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur sesungguhnya. Adapun proyek-proyek

¹³⁹ “*Water Front City* Harapan yang Sirna,” *Riau Pos*, 21 Desember, 2014, hal. 16.

¹⁴⁰ “Gedung Bedah Central Masuk APBD 2015,” *Riau Pos*, 3 November, 2014, hal. 32.

Pemerintah Provinsi Riau yang dibatalkan setelah Annas Maamun tertangkap tangan oleh KPK ialah pelepasan lahan 18 bangunan kantor di sekitar Siak IV, Rumbai, proyek *flyover* di simpang SKA, dan proyek pembangunan 1.538 Rumah Layak Huni di 702 desa yang sementara harus dihentikan.¹⁴¹

B. Komunikasi Krisis Pemerintah Provinsi Riau Terkait Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014

1. Upaya Penanganan Krisis oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Ketika Annas Maamun sebagai Gubernur Riau periode 2014-2019 tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 25 September 2014 di Perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau mengalami suatu krisis. Adanya krisis dalam suatu pemerintahan kemudian mengharuskan pemerintah untuk sigap mengambil upaya penanganan krisis. Dalam hal ini, upaya penanganan krisis kemudian dilakukan oleh pihak Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Adapun tindakan penanganan krisis yang dilakukan oleh pihak Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau ialah sebagai berikut :

a. Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai juru bicara pemerintahan

Saat Annas Maamun terjerat dalam kasus suap hingga mengalami Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 25 September 2014 di Perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau kemudian menjadi sasaran bagi para pencari berita untuk memperoleh konfirmasi mengenai kasus tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Periode Jabatan Annas

¹⁴¹ “1.538 RLH Terancam Batal,” *Riau Pos*, 11 Oktober, 2014, hal. 32.

Maamun dinyatakan bahwa pihak Biro Hubungan Masyarakat merupakan sasaran utama yang dituju oleh pihak media massa.

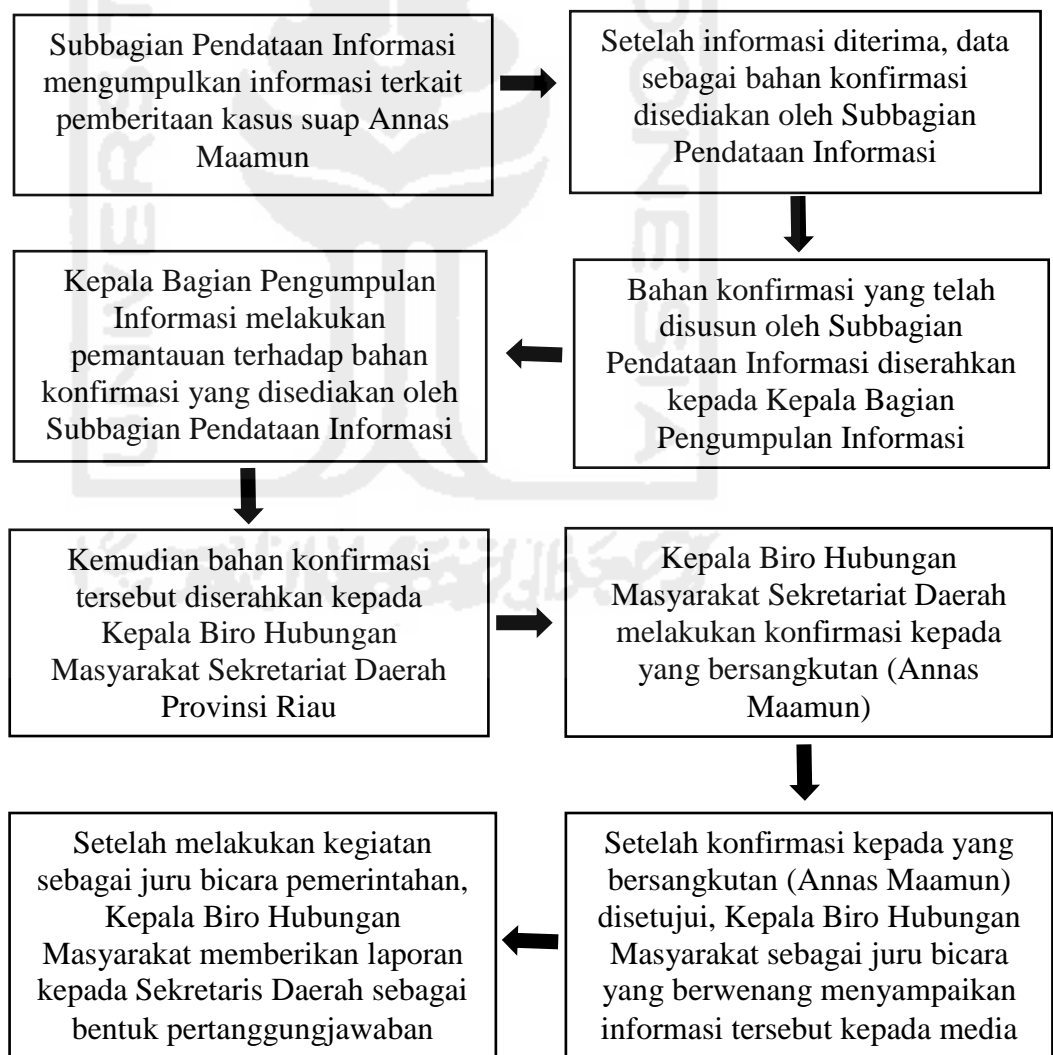
“Ketika Pak Annas ditangkap yang pertama dihubungi itu pihak Humas. Rumah saya ditunggu wartawan. Ada mobil siaran langsung Metro TV, ada mobil siaran langsung TV One di depan rumah itu. Menunggu minta statement. Itu hal yang wajar. Karena mungkin mengapa media mencari humas karena pada saat itu kan mereka belum bisa berhubungan dengan orang yang ditangkap yang namanya Annas Maamun itu. Tetap yang dicarinya juru bicaranya untuk meminta informasi.”¹⁴²

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai staff pemerintahan yang memiliki tugas terkait dengan kegiatan hubungan masyarakat kemudian bertindak sebagai juru bicara pemerintahan. Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang dalam hal ini ialah Kepala Biro diberikan kewenangan sebagai juru bicara pemerintahan, bersamaan dengan kewenangan yang juga dimiliki oleh Sekretaris Daerah. Dalam melakukan tugasnya sebagai juru bicara pemerintahan, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau akan menyampaikan pesan-pesan yang normatif. Hal tersebut dilakukan agar pesan yang disampaikan tidak memiliki makna provokatif. Selain itu, pesan-pesan yang normatif juga dapat memberikan ketenangan bagi para penerima pesan yang dalam hal ini ialah masyarakat Provinsi Riau. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Periode Jabatan Annas Maamun, Dr. Yoserizalzen, MSn. (15 Oktober 2016), *“sebagai juru bicara tentu mencari jawaban-jawaban yang normatif. Kita tak mungkin lepas. Tak mungkin pula kita melarikan diri dari pertanyaan itu.”¹⁴³*

¹⁴² Yoserizalzen, wawancara bersama penulis, 15 Oktober 2016.

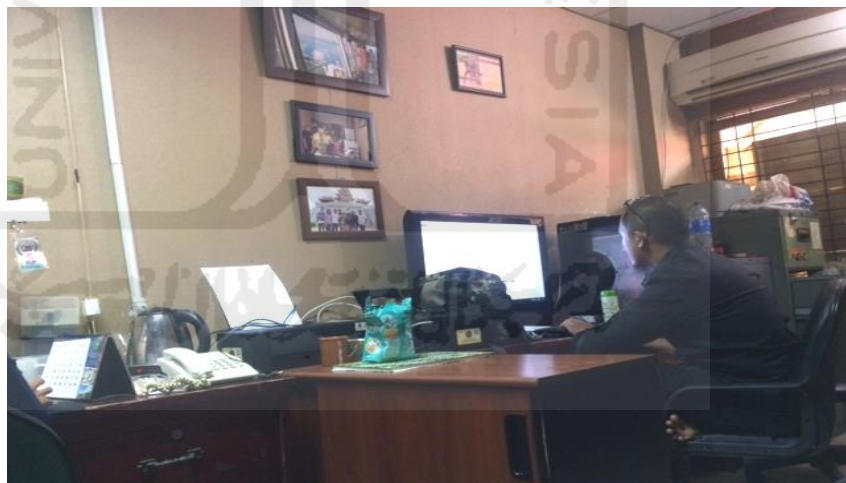
¹⁴³ Yoserizalzen, wawancara bersama penulis, 15 Oktober 2016.

Sebagai juru bicara pemerintahan, tidak hanya Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau saja yang bertindak melakukan tugas. Namun, bagian-bagian lainnya yang berada di ruang lingkup Biro Hubungan Masyarakat juga melakukan beberapa tugas sebagai pendukung dari pelaksanaan tugas juru bicara pemerintahan tersebut. Adapun bagian-bagian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tugas sebagai juru bicara pemerintahan tersebut ialah Bagian Pengumpulan Informasi dan Subbagian Pendataan Informasi. Tahapan pelaksanaan tugas sebagai juru bicara pemerintahan oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau ialah sebagai berikut :



Gambar 3.10
Bagan Tahapan Pelaksanaan Tugas Juru Bicara Pemerintahan
Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki ruang khusus bagi Bagian Pengumpulan Informasi. Ruang khusus Bagian Pengumpulan Informasi tersebut dikhususkan untuk para staff Bagian Pengumpulan Informasi dalam melaksanakan tugas pengumpulan dan pendataan informasi. Dalam ruangan tersebut, para staff Bagian Pengumpulan Informasi khususnya staff Subbagian Pendataan Informasi akan mengumpulkan informasi sebagai bahan-bahan konfirmasi ketika Kepala Biro Hubungan Masyarakat akan menyampaikan klarifikasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau akan menggunakan bahan-bahan konfirmasi yang telah dipersiapkan oleh Subbagian Pendataan Informasi untuk mendukung penyampaian klarifikasi yang dilakukan.



Gambar 3.11
Ruangan Bagian Pengumpulan Informasi
Biro Humas Setda Provinsi Riau
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pelaksanaan tugas Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai juru bicara pemerintahan terlihat ketika Kepala

Biro Hubungan Masyarakat menyampaikan *statement* atau klarifikasi terkait kasus tersebut. Adapun upaya penyampaian *statement* resmi tersebut disampaikan kepada beberapa media massa, baik lokal maupun nasional. Berikut kutipan pernyataan resmi yang disampaikan oleh juru bicara pemerintahan, yakni Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam Surat Kabar Harian Riau Pos terbitan 29 September 2014, halaman 3 :

iggu UU Pemda Diteken Pre

dilan). "Proses dan prosedur pemberhentian sementara dan tetap sama dengan UU Pemda yang lama tanpa ada perubahan," terang Dodi.

Pasca ditetapkan sebagai ter-sangka dan ditahan sejak Jumat (26/9) pekan lalu, belum ada aktivitas ataupun keluarga dan kerabat yang menjenguk Annas Maamun yang kini berada di Rutan Guntur di dalam kompleks Polisi Militer Gajah Mada, Jakarta Timur.

Pantauan *Riau Pos*, Ahad (28/9), salah seorang petugas lapas Guntur mengaku, hingga saat ini belum ada dari keluarga maupun kerabat yang mengunjungi Ketua DPD Golkar Riau itu. Karena menurutnya, sesuai dengan ketentuan KPK bahwa waktu berkunjung tahanan titipan KPK di Rutan Guntur hanya diperbolehkan pada Senin dan Kamis, den-



DODI RİYATMADJI

gan catatan harus memperoleh surat izin dari KPK.

Dalam pada itu Wakil Gubernur Riau H Arsyad-jullandi Rachman mengajak semua pihak terutama pejabat di pemerintahan untuk dapat men-

ngikuti aturan yang ada. Yang jelas semua perslapan dalam menjalankan program keglatan tidak ada satupun yang terhenti sesuai visi-misi pasangan Annas Maamun-Andi Rachman.

"Kita ikuti aturan saja. Karena hal seperti ini perlu dilaksanakan sesuai peraturan yang jelas, jadi kita tunggu pusat saja," kata Wagubri melalui Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Yoserizal Zen kemarin.

Wagubri yang bertolak ke Jakarta kemarin dalam rangka menghadiri pesta pernikahan kerabat, lalu kemudian menjenguk Asisten

III Setdaprov Riau, Hardy Djamaluddin yang terbaring sakit di salah satu rumah sakit (RS) di Jakarta karena dikabarkan menderita leukemia.

Apakah keberangkatan Wagubri bersama beberapa pejabat kemarin ke Jakarta tersebut diikuti kunjungan H Annas Maamun di Rutan Guntur, Yose menyebutkan belum mengetahui pasti. Karena belum diketahui apakah Annas sudah bisa dibesok atau belum.

"Belum tahu, kita lihat besok," singkatnya sambil menyebut bahwa keluarga besar Gubri H Annas Maamun dikabarkan sudah berada di Jakarta dan tentu leblh diprioritaskan untuk bertemu.

Tak Tahu soal Alih Fungsi Hutan

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kuansing, Dr Agusmandar MSI menegaskan, dirinya tidak tahu soal alih fungsi hutan di daerah ini yang menjerat Annas Ma-

mun. Agusmandar yang dikonfirmasi, Ahad (28/9) menegaskan, Dishut Kuansing tidak pernah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan HPT HSL menjadi APL walaupun RTRW Riau yang baru sudah disahkan. Kalau Pemprov Riau yang menggarap proses alih fungsi lahan

PENGUMUMAN F

Nomor : 4923/E124K

Bersama ini kami sumumkan kepada persyaratan untuk mengikuti Pelelangan

" PEMBUATAN REST AREA UNTUK RUI

1. Ketentuan Calon Peserta Lelang
 - Perusahaan Mitra Kerja SKT maupun
 - Kualifikasi : M (Menengah
 - Bidang : Jasa Pelaksanaan
 - Sub Bidang : Bangunan Bang
 - Lainnya termasuk
 2. Syarat - syarat pendaftaran untuk P
 - Dapat dilihat pada website Pertamina
 - <http://www.pertamina.com/awg-00>
 - program atau menghubungi tel
- Dumail, 29 September 2014
PT. Pertamina (Persero) RU- II
Ketua Panitia Pelelangan Pengada

Gambar 3.12

Kutipan Pernyataan Resmi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Riau sebagai Juru Bicara

Sumber : Arsip e-paper Bulan September Harian Riau Pos

Pernyataan yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau ketika dimintai keterangan sebagai juru bicara pemerintahan. Pernyataan tersebut dimuat dalam Surat Kabar Harian Riau Pos dengan tanggal terbit 6 Oktober 2014, halaman 3 :

pukul 10.20 WIB. Kondisi kediaman yang dijaga pihak Satpol PP Provinsi Riau dengan pagar terkunci langsung dibuka dan Satpol PP mempersilakan tim KPK masuk.

"Mobil di parkir di bagian depan kediaman dan dikawal ketat Brimob Polda Riau. Tempat biasa Gubernur ke luar dalam menjalani aktivitasnya," kata salah seorang petugas Satpol yang berjaga.

Setelah masuk ke rumah, tim KPK didampingi beberapa pejabat dan pegawai kantor Gubernur, seperti Kasatpol PP Riau, Noverius dan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Riau. Namun diketahui hanya bagian rumah tangga yang diizinkan

Karena memang pascapenangkapan dan penahanan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubri H Annas Maamun dan Gulat ME Manurung di Cibubur, Jakarta akhir September lalu, rumah dinas Gubernur berlangsung-angsur ditinggal sanak keluarga dan pembantu.

Sehingga hasil penggeledahan, KPK hanya membawa sedikit dokumen dan berkas. Sebab yang tersisa hanya pakaian dan barang-barang rumah tangga lainnya. Menurut Noverius, apa yang dicari dan digeledah KPK tidak diketahuinya sama sekali. "Masih ada beberapa berkas memang di kamar Gubernur. Tidak tahu apa yang dibawa," katanya.

membesuk gubernur yang kini sedang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, Jakarta. "Usai Salat Id, Pak Wagub langsung ke Jakarta. Memang diagendakan menjenguk Pak Gubernur," kata Kepala Biro Umum Setdaprov Riau, Doni Aprialdi.

Sementara itu Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Yoserizal Zen juga mengakui bahwa Wagubri menyempatkan diri untuk menjenguk Gubernur di tahanan. "Untuk bersilaturahmi saja, karena kan ini Hari Raya," sebutnya.

Belum Terima SK Plt Gubernur

Sementara itu, hingga kini, dua pekan pascapenahanan Gubri H Annas Maamun oleh

BADAN OPERASI BERSAMA
PT. Bumi Sialk Puskas - Pertamina
 CPT BLOCK, CENTRAL SUMATRA GAS

Head Office: Menara Bank Danaromon 20th Floor Mega Kuningan Jakarta, Indonesia, P.O. Box 100000000
 Main Operation Office: Headquarter Blok Sialk Riau, Indonesia, Phone 0756

PENGUMUMAN LELANG

NO.	LELANG NO. / JENIS PEKERJAAN	KLASIFIKASI BIDANG & BAWANG/SUB BIDANG
1	No. 187-14-DWO Jasa Pekerjaan Perawatan Peralatan Pemboran di Dalam Sumur Minyak dan Gas Untuk Memulangi Program Pemboran	JASA PEMBORONGAN Bidang : Perawatan Minyak/Gas dan Sub Bidang : Pekerjaan pemeliharaan

Bagi Peserta Bidding/ Jasa yang berminat serta memperoleh pengumuman dapat melihat di URL: www.bobcpo.co.id atau PT. Bumi Sialk Puskas - Pertamina melalui Layanan Lelang Menara Bank Danaromon Lt. 20, J. Prof. Dr. Soetjo Kav. E1.1.0, Mega Kuningan, Oktober 2014, jam 09.00 s.d. 11.00 dan 13.30 s.d. 15.00 WIB selanjutnya hari-hari kerja (waktu WIB). Pengumuman ini dapat juga dilihat pada website www.bobcpo.co.id

SYARAT-SYARAT PESERTA BIDDING:

- Surat Permits/izin Mengikuti Pelelangan bermeterai cukup;
- COPY STP yang masih berlaku;
- Susunan Kepegawaian Perusahaan;
- Melampirkan Surat Pernyataan bersedia memenuhi target pencapaian TKDN; dan
- Bagi Peserta Bidding/ Jasa yang melakukan penawaran harus mendaftar dan berdiskusi pada sebelum penastar/ kualifikasi.

Bagi Peserta Bidding/ Jasa yang telah mendaftar SPDB B0/B yang masih berstatus pengantar/ pengesahan No. 2, 3, dan 4.

Jika yang mendaftar bukan Direktur/ Pimpinan Perusahaan, maka harus ditandatangani oleh Direktur/ Pimpinan Perusahaan.

Seluruh persyaratan kualifikasi mengacu pada ketentuan Peraturan, bagi Perusahaan yang akan mengundang untuk mengikuti proses Pra-kualifikasi.

Ditentukan hari-pagi minggu.

Zamrud, 08 Oktober 2014
 Kepala Pengumuman Bidding/ Jasa
 B0/B PT. BSP - Pertamina Hulu
 TSB
 Ketua



Gambar 3.13
Kutipan Pernyataan Resmi Kepala Biro Humas
Setda Provinsi Riau

Sumber : Arsip e-paper Bulan September Harian Riau Pos

b. Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai fasilitator bagi media massa

Dalam upaya penanganan krisis, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga melakukan pengendalian terhadap wartawan dari sejumlah media massa. Hal tersebut bertujuan agar Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapat melakukan *controlling* atau pengawasan terhadap pemberitaan yang beredar terkait pemerintahan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Periode Jabatan Annas Maamun (15 Oktober 2016) dinyatakan bahwa :

"Iya, kalau Humas itu kan kita tetap menggunakan media massa. Apapun terjadi, media massa itulah sahabat kita. Media massa itulah istri kita. Media massa itu kunci segala-galanya. Pencitraan Pak Annas jelek ini juga tidak terlepas dari media massa. Kalau banyak persoalan-persoalan sebelum itu kan galau itu pelecehan seksual, nah itu kan akibat dari tidak adanya komunikasi dengan media massa. Humas itu juga kan, kita menjadi

jembatan dari suatu kasus, antara Pak Annas dan wartawan. Nah kita berada di tengah-tengah.”¹⁴⁴

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga bertindak sebagai fasilitator bagi media massa. Salah satunya ialah dengan menyediakan ruang khusus bagi para wartawan. Pada gedung kantor Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau disediakan salah satu ruangan khusus bagi wartawan-wartawan media massa, baik itu lokal maupun nasional. Pada ruangan khusus wartawan tersebut disediakan beberapa meja dan kursi sebagai fasilitas bagi para wartawan yang ingin mencari informasi dan berita mengenai pemerintahan. Di samping itu, ruang khusus wartawan tersebut juga selalu ramai didatangi oleh para wartawan hanya sekedar untuk bersilaturahmi dengan wartawan dari media-media lokal lainnya. Adanya penyediaan ruang khusus wartawan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam pemenuhan tugasnya sebagai fasilitator bagi media massa.



Gambar 3.14
Ruang Bagian Penerangan Biro Humas
Setda Provinsi Riau
Sumber : Dokumentasi Pribadi

¹⁴⁴ Yoserizalzen, wawancara bersama penulis, 15 Oktober 2016.

Selain menyediakan ruang khusus wartawan, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga menyediakan *press release* serta pengadaan *press conference* terkait kasus yang terjadi. *Press release* akan disusun dan ditulis oleh staff dari Subbagian Bina Pemberitaan. Kemudian akan disampaikan kepada Kepala Bagian Penerangan dan diteruskan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Setelah Kepala Biro Hubungan Masyarakat menerima *press release* yang akan dikeluarkan, terlebih dahulu meminta persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau.



Gambar 3.15
Kegiatan Penulisan Naskah *Press Release*
oleh Staff Subbagian Bina Pemberitaan
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Sedangkan tahapan pelaksanaan *press conference* yang dilakukan untuk menangani krisis berada di bawah lingkup tugas Subbagian Bina Pemberitaan. Para staff Subbagian Bina Pemberitaan akan menyediakan berbagai kebutuhan *press conference*. Di samping itu,

Subbagian Hubungan Pers akan menjalankan tugas sebagai bagian yang menghubungi wartawan-wartawan media massa untuk hadir pada *press conference* yang dilakukan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Dr. Yoserizalzen, MSn. (15 Oktober 2016) dinyatakan bahwa Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau serius pada setiap pelaksanaan *press conference*. Tidak hanya mempersiapkan kebutuhan data, Biro Hubungan Masyarakat juga memperhatikan kebutuhan dana bagi pelaksanaan *press conference*.

“Kita menyiapkan data. Tak data aja, dana juga kita siapkan. Dana itu bukan berarti kita untuk menyogok media. Kita kan kadang-kadang mengadakan press conference, coffee morning, gitu kan dianggarkan dari APBD.”¹⁴⁵

Berdasarkan krisis yang terjadi terkait kasus suap Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun kemudian dilakukan *press conference* dari Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. *Press conference* tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam Pemerintah Provinsi Riau. Sekaligus sebagai himbuan kepada seluruh pegawai pemerintahan agar tetap menjalankan tugas dan fungsi pokok yang dimiliki serta tidak terprovokasi hal apapun terkait dengan kasus yang terjadi. Berikut hasil pelaksanaan *press conference* yang dilakukan dan dimuat di media cetak lokal Provinsi Riau, yakni Riau Pos.

¹⁴⁵ Yoserizalzen, wawancara bersama penulis, 15 Oktober 2016.

dan kebenaran di mata hukum.

"Jika terbukti bersalah, maka diberikan hukuman seadil-adilnya. Kalau sebaliknya, maka dibebaskan dan nama baiknya dikembalikan," ungkap Musfihin sembari mengatakan bahwa dengan status sebagai tersangka yang belum tentu bersalah, maka pihaknya mengedepankan praduga tak bersalah.

Untuk saat ini tambah Musfihin, DPP belum akan mengambil keputusan untuk menonaktifkan Annas Maamun sebagai Ketua DPD Partai Golkar Riau. Prosedur yang ada, jika kader menjadi terdakwa dan mulai disidangkan di pengadilan, maka baru dinonaktifkan.

"Kita imbau pengurus DPD Riau dan Jajarannya supaya melakukan konsolidasi. Seluruh program jangan sampai terganggu," pintanya.

Pembangunan Harus Berjalan
Sementara Ketua Sementara DPRD Riau, Suparman mengaku prihatin dengan kondisi yang menimpa Gubernur Riau, Annas Maamun. Kendati demikian, ia menilai roda pemerintahan dan pembangunan di Riau harus tetap berjalan.

"Pembangunan harus berjalan. Karena kita memahami, beliau (Gubri, *red*) semangat dalam membangun Riau. Kita juga menyarankan kepada Wagubri, agar dapat menggantikan peran beliau sementara," ujar-

memilih bungkam. Dengan melemparkan senyum, Wakil Sekum DPP Golkar itu terlihat memasuki kendaraan operasionalnya.

Ketua DPRD Provinsi Riau Sementara, Suparman usai pertemuan dengan Wagubri mengatakan, jika Wagubri hanya datang bersilaturahmi ke DPRD Riau. Kendati demikian, ia mengatakan, Wagubri berpesan agar tetap menjaga kondusifitas.

Penangkapan Annas Maamun oleh KPK membawa reaksi bagi masyarakat Riau. Jumat (26/9) pagi, hampir seratusan massa dari elemen mahasiswa di bawah bendera Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas Riau (BEM-Unri) menggelar aksi demo di kantor Gubernur. Demonstran menyalakan apa yang menimpa Gubri H Annas Maamun sebagai presiden buruk bagi Provinsi Riau.

Mahasiswa yang merangsek dari Jalan Cut Nyak Dien menuju gerbang depan kantor Gubernur di Jalan Sudirman, langsung membenteng spanduk dan berorasi perihal penangkapan Gubri di Jakarta. Aksi tersebut juga sebagai bentuk berkeabang atas kondisi yang menimpa gubernur di Riau yang selalu berakhir dengan penegak hukum.

Keprihatinan Mendalam
Pasca-penetapan status Gubri Annas Maamun sebagai tersangka oleh KPK RI terkait kasus pelepasan ka-

masyarakat awam di Pekanbaru membahas secara standar informasi penangkapan dari operasi tangkapan (OTT) Gubri bersama delapan orang lainnya di Jakarta.

Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Yosertzal Zen, meminta kepada seluruh pegawai agar tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Diharapkan tak ada gejolak yang mendasar terjadi sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian pula terkait tugas-tugas pemerintahan, lanjut Yose apa yang menjadi wewenang Gubri, bisa dijalankan oleh Wagubri maupun Sekdaprov Riau. "Pegawai jangan terpecah atas apa yang terjadi. Mari kita tetap bekerja demi memberikan pelayanan terbaik agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai tupoksi masing-masing," sambungnya.

Perihal pendampingan hukum kepada Gubri, tambah mantan Kepala Museum Riau tersebut, Pemprov akan mempelajari sehingga apa yang menjadi bantuan dari segi hukum sebagai hak Annas Maamun pasti akan diberikan. "Kita tunggu dan ikuti prosesnya. Pemerintah akan mempelajari terkait bantuan hukum nantinya," tutup Yose. (fat/yud/rto/egp/h)

■ TATA LETAC: MEGA

Gambar 3.16 Pernyataan yang Disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Riau dalam *Press Conference*

Sumber : Arsip e-paper Bulan September Harian Riau Pos

Di samping itu, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga selalu menjaga situasi kondusif pemberitaan agar krisis tidak semakin melebar. Hal tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik kepada media massa agar memperlihatkan salah satu itikad baik dari pemerintahan serta tidak menutup diri dari kasus yang telah terjadi. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan media massa ialah mengadakan *coffee morning*. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Subbagian Hubungan Pers Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Eriadi Fahmi (17 Oktober 2016) dinyatakan bahwa :

"Kita menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan media yang ada. Baik itu media lokal maupun nasional

yang ada di Riau. Kan ada kontributor-kontributor di Riau. Kemudian kita ajaklah, entah itu semacam coffee morning, kita temui mereka, kita datangi. Intinya, menguatkan lagi silaturahmi. Mengeratkan lagi komunikasi. Kan sudah lama terjalin dengan baik ini komunikasi dengan wartawan.”¹⁴⁶

2. Upaya Komunikasi Krisis Pemerintah Provinsi Riau Setelah Krisis

Setelah masa krisis berakhir, Pemerintah Provinsi Riau kemudian mulai memasuki tahapan pasca-krisis. Tahapan pasca-krisis merupakan tahapan dimana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemulihan (*recovery*) dan perbaikan. Berikut beberapa upaya komunikasi krisis yang dilakukan pada tahap pasca-krisis oleh Pemerintah Provinsi Riau :

a. Melakukan publikasi positif bagi Pemerintah Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau juga secara rutin melakukan publikasi yang positif bagi pemerintahan. Publikasi terus dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau melalui beberapa saluran, yakni media massa lokal dan *website* Humas Pemerintah. Publikasi tersebut dilakukan agar masyarakat Provinsi Riau mengetahui segala kegiatan positif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Penyiaran publikasi tersebut kemudian merupakan bagian dari strategi komunikasi krisis yang dilakukan dengan sasaran utama masyarakat. Publikasi tersebut dilakukan agar kegundahan di tengah-tengah masyarakat dapat terobati. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Subbagian Hubungan Pers Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Eriadi Fahmi (17 Oktober 2016) dinyatakan bahwa :

“Kita sebagai humas tentu berupaya memberikan publikasi yang cukup. Memberikan pemberitaan-pemberitaan yang positif tentang pemerintah Provinsi Riau. Jadi kita terus berupaya memberikan pemberitaan-pemberitaan yang positif, lebih terbuka kepada media-media. Kemudian lebih

¹⁴⁶ Eriadi Fahmi, wawancara bersama penulis, 17 Oktober 2016.

*intens menyampaikan berita-berita. Lebih intens, lebih transparan lagi. Dan tentunya kita berharap dengan adanya kasus ini menjadi pelajaran untuk generasi yang berikutnya.”*¹⁴⁷

Publikasi tersebut juga dilakukan melalui siaran pers yang dibagikan kepada wartawan-wartawan media massa serta dirilis di berbagai saluran media yang dimiliki oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subbagian Hubungan Pers Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Eriadi Fahmi (17 Oktober 2016) :

*“Ada. Kita sering siaran pers. Siaran pers tentang kegiatan-kegiatan Gubernur, kegiatan pemerintah Provinsi Riau kita sampaikan melalui siaran pers ke media cetak, media elektronik, media online sekarang ada, website dirilis-rilis kegiatan. Setiap kegiatan kita rilis. Namun, ada juga wartawan-wartawan yang meliput secara langsung. Kalau wartawan kan mungkin mengambil angle beritanya kan sesuai dengan perspektif mereka lah. Kalau untuk kita kan disiapkan juga sesuai dengan versi kita lah. Jadi pembangunan-pembangunan, program itu kita komunikasikan langsung ke masyarakat.”*¹⁴⁸

Salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan publikasi positif pemerintah dilakukan melalui *website* resmi Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang dapat diakses pada humas.riau.go.id. Pada *website* resmi tersebut, secara rutin diberitakan kegiatan-kegiatan positif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut diyakini oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapat memulihkan citra pemerintahan melalui pemberitaan-pemberitaan positif yang disampaikan.

¹⁴⁷ Eriadi Fahmi, wawancara bersama penulis, 17 Oktober 2016.

¹⁴⁸ Eriadi Fahmi, wawancara bersama penulis, 17 Oktober 2016.



Gambar 3.17
Website Resmi Biro Hubungan Masyarakat
Setda Provinsi Riau
Sumber : Website humas.riau.go.id



Gambar 3.18
Tampilan Website Resmi Biro Hubungan
Masyarakat Setda Provinsi Riau
Sumber : Website humas.riau.go.id

Salah satu contoh publikasi positif yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau akibat kasus korupsi yang menimpa beberapa Gubernur Riau terdahulu ialah dengan menjalin kersama

bersama pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Wartawan Senior dan Mantan Ketua Ikatan Persatuan Wartawan Riau, H. Helmi Burman (18 Oktober 2016) dinyatakan bahwa :

“Berulang kali pemerintah bekerja sama dengan KPK mengadakan seminar atau pelatihan atau pengarahan dari KPK berulang kali. Kemarin juga baru selesai. Nanti makanya, Desember nanti, Riau menjadi tuan rumah anti korupsi. Hari anti korupsi Indonesia. Karena Riau ini menjadi prioritas utama dari KPK.”¹⁴⁹

Penjalinan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan salah satu publikasi positif yang disampaikan Pemerintah Provinsi Riau untuk memperlihatkan bahwa pemerintah serius atas penanganan kasus korupsi. Kegiatan penjalinan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut juga dirilis dalam *website* resmi humas.riau.go.id. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan yang dilakukan diketahui secara luas oleh masyarakat Provinsi Riau.



KPK Siap Melakukan Pendampingan Tata kelola Daerah dengan Pemerintah Provinsi Riau

PEKANBARU (Humas Riau) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah pejabat di provinsi Riau, untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan ...

484 No Comments

Gambar 3.19
Rilis Kegiatan Penjalinan Kerjasama dengan KPK
Sumber : Website humas.riau.go.id

¹⁴⁹ Helmi Burman, wawancara bersama penulis, 18 Oktober 2016.

KPK

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Hari Ini KPK Rakor Bersama Pejabat Riau

PEKANBARU (Humas Riau) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat di provinsi Riau, hal ini dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Riau. ...

[Read More...](#)

451 No Comments

Gambar 3.20 Rilis Kegiatan Rapat Koordinasi bersama KPK dan Pejabat Riau

Sumber : Website humas.riau.go.id



Bersama KPK, Pejabat Riau Tandatangani MoU Pencegahan Korupsi

PEKANBARU (Humas Riau) – Pada saat pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi, supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi Riau antara KPK dan pemangku kepentingan di Riau, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman melakukan penandatanganan nota ...

[Read More...](#)

554 No Comments

Gambar 3.21 Rilis Kegiatan Penandatanganan MoU Kerjasama Pejabat Riau bersama KPK

Sumber : Website humas.riau.go.id

- b. Menyediakan saluran komunikasi dengan sistem *e-government* dan bersifat *public oriented*

Setelah krisis akibat dari kasus suap Annas Maamun tersebut mulai berakhir, Pemerintah Provinsi Riau mulai membuka diri atas segala informasi umum yang dimiliki. Pemerintah Provinsi Riau kemudian menyediakan saluran komunikasi dengan sistem *e-government* dan bersifat *public oriented*. Penyediaan saluran komunikasi ini dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum melalui portal resmi pemerintah. Dalam saluran komunikasi ini, Pemerintah Provinsi Riau menyediakan berbagai informasi sebagai bagian dari keterbukaan informasi. Meliputi resapan APDB Riau, pengumuman jadwal tes *assessment* untuk lelang jabatan, statistik kemasyarakatan, kebijakan pemerintah, hingga agenda dari Gubernur Riau. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Periode Jabatan Annas Maamun, Dr. Yoserizalzen, MSn. (15 Oktober 2016) dinyatakan bahwa :

“Sekarang pola komunikasi antar staff lebih terbuka. Sekarang asas keterbukaan lebih diterapkan di Pemerintahan Provinsi Riau. Dibuktikan dengan adanya jaringan-jaringan informasi melalui e-government. Nah itu kan pola keterbukaan. Anggaran juga lebih dibuka. Pak Andi ini orientasinya lebih kepada public oriented.”¹⁵⁰

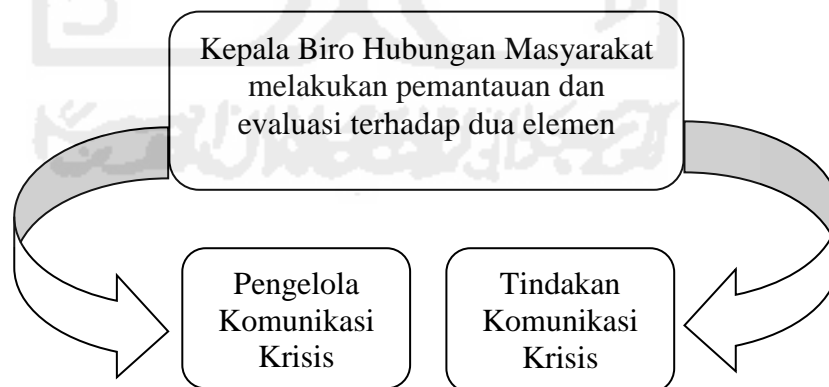
Disediakannya saluran komunikasi dengan sistem *e-government* dengan publik sebagai orientasinya kemudian menjadi salah satu upaya komunikasi krisis Pemerintah Provinsi Riau pada tahap pasca krisis yang mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut menjadi salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan.

¹⁵⁰ Yoserizalzen, wawancara bersama penulis, 15 Oktober 2016.

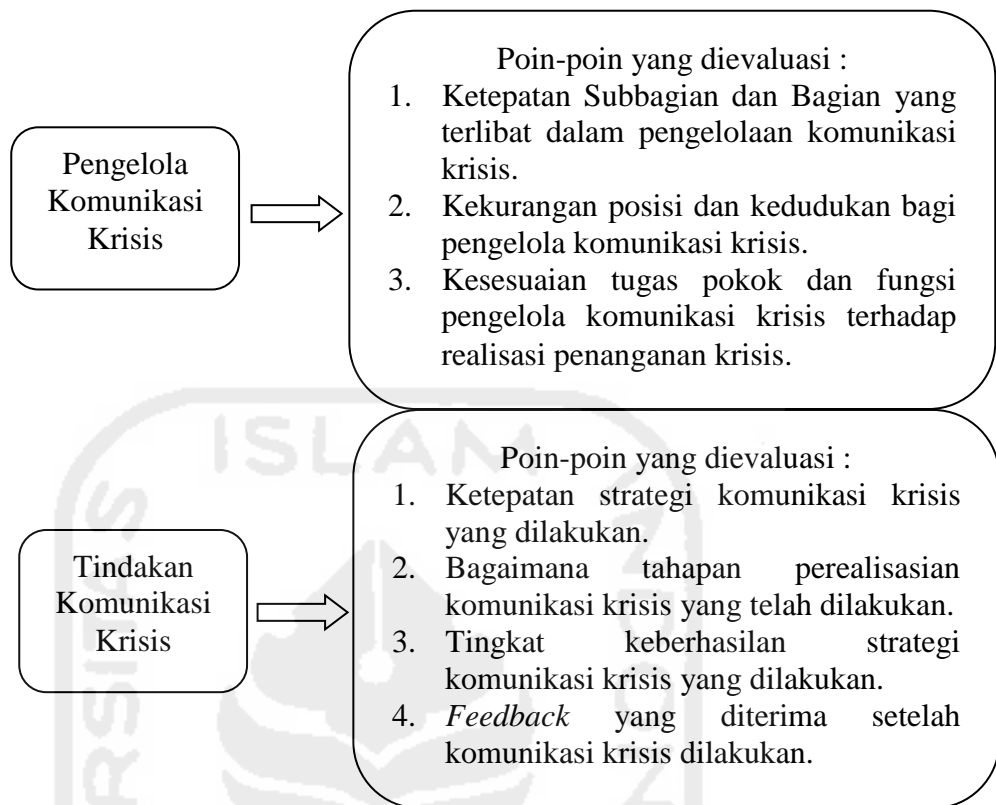
C. Evaluasi Komunikasi Krisis yang Dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Dalam melakukan tahapan komunikasi krisis, evaluasi menjadi tahapan akhir yang dilakukan oleh suatu institusi. Tahapan evaluasi tersebut kemudian menjadi salah satu metode pembelajaran bagi institusi setelah mengalami krisis. Pada kasus suap yang melibatkan Gubernur Riau Nonaktif, Annas Maamun tahun 2014, Pemerintah Provinsi Riau mengalami masa krisis hingga akhirnya harus melakukan beberapa upaya untuk mengatasi krisis tersebut. Setelah beberapa upaya penanganan krisis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi guna memperbaiki upaya penanganan krisis institusi ke depan.

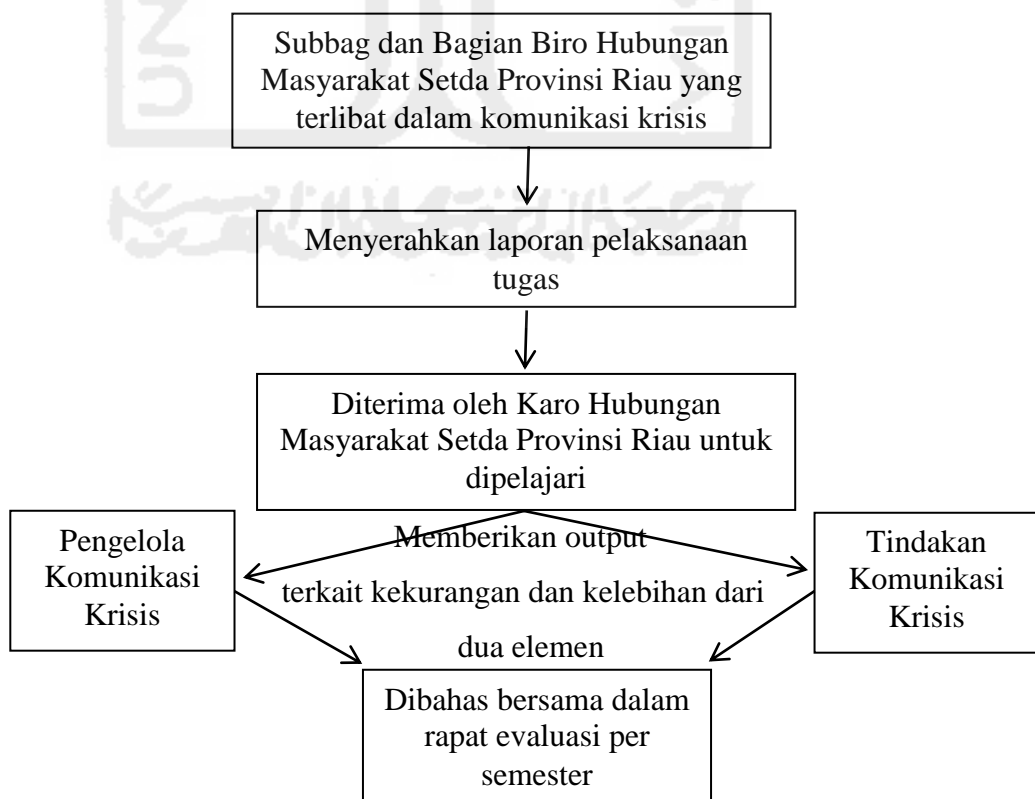
Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau terkait upaya penanganan krisis yang telah dilaksanakan dilihat dari dua elemen. Pertama, dilihat dari segi pengelola komunikasi krisis. Kedua, dilihat dari segi tindakan yang dilakukan. Adapun pola evaluasi yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 3.22
Pola Evaluasi Biro Humas Setda Provinsi Riau



Berikut skema evaluasi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau :



Berdasarkan evaluasi terkait komunikasi krisis yang dilakukan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau melihat adanya kekurangan dan kelebihan dari dua elemen tersebut. Kekurangan pertama ialah kurangnya posisi dan kedudukan penulis berita profesional bagi *website* milik Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau periode jabatan Annas Maamun, Dr. Yoserizalzen, MSn. (15 Oktober 2016) :

“Belum punya orang yang langsung bisa bikin berita. Kita mestinya punya wartawan, punya penulis yang bisa membikin suasana tenang di tengah-tengah persoalan itu kan. Tapi kita kan belum melakukan itu. Jadi hanya melalui media massa, melalui rekan-rekan wartawan kita coba memberikan semacam penenang atas hiruk-pikuk dari persoalan-persoalan Annas Maamun.”¹⁵¹

Selain kurangnya posisi penting tersebut pada pengelola komunikasi krisis, evaluasi juga diperhatikan pada banyaknya pemeran juru bicara ketika krisis terjadi. Padahal, yang diberikan kewenangan untuk menjadi juru bicara pemerintahan ialah Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau saja. Oleh karena itu, permasalahan informasi yang simpang siur dan berlebihan menjadi poin utama yang dievaluasi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

“Semua merasa berhak jadi juru bica Pak Annas. Padahal orang non-pemerintahan. Berbeda dengan Pak Andi ini, ditetapkan kalau bukan Sekda yang berbicara, Humas saja yang berbicara. Dulu kan karena ada orang luar, jadi semrawut.”¹⁵²

Adanya informasi yang berlebih tersebut juga kemudian mengakibatkan munculnya berbagai persepsi dari masyarakat Riau sehingga perlu untuk dievaluasi guna kebaikan komunikasi krisis selanjutnya.

¹⁵¹ Yoserizalzen, wawancara bersama penulis, 15 Oktober 2016.

¹⁵² Yoserizalzen, wawancara bersama penulis, 15 Oktober 2016.